



RENSTRA

DINAS KEHUTANAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2024 - 2026



Telp. 741963 - 741807



dishut.kaltim@gmail.com



dishut.kaltimprov.go.id



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - BAB VII. serta Pendanaan;
 - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

PENGANTAR

Provinsi Kalimantan Timur sedang berproses menjalani era baru pembangunan kehutanan. Insentif yang diterima dari program penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) berbasis hutan dan lahan merupakan pembelajaran pertama di Indonesia. Di kala bisnis pemanfaatan hutan berbasis hasil hutan kayu yang cenderung statis dari tahun ke tahun dalam decade terakhir, pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan masyarakat memerlukan model bisnis baru, termasuk untuk membuka kunci bisnis hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, seperti perdagangan karbon maupun pembayaran berbasis kinerja untuk upaya penurunan emisi GRK.

Dibukanya ruang penyelesaian konflik tenurial melalui skema Tanah untuk Obyek Reformasi Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial, telah menurunkan ketidakpastian usaha kehutanan, serta memberikan ruang peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Periode lima tahun sebelumnya, yang juga melalui masa pandemi Covid-19, menyebabkan penurunan pergerakan ekonomi dalam berbagai sektor, termasuk sektor kehutanan. Namun demikian, juga terjadi penurunan laju deforestasi dan emisi GRK dari sektor berbasis hutan dan lahan. Kondisi ini yang memerlukan penanganan dan pengelolaan pembangunan kehutanan secara holistik-integratif, tematik dan berbasis spasial (HITS).

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Renstra Dishut Kaltim) tahun 2024-2026 merupakan penjabaran perencanaan sektor dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, sebagai dokumen perencanaan di masa transisi kepemimpinan daerah, hingga definitifnya Gubernur Kalimantan Timur yang akan dipilih pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Renstra Dishut Kaltim ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan pendanaan urusan Kehutanan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran, serta target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Semoga cita-cita pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat dapat segera berwujud, dan semoga Kalimantan Timur semakin tangguh dan bertumbuh.

Samarinda, April 2023

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur



H. Joko Istanto, S.P., M.Si.

NIP. 19750807 200003 1 003

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
I. 1. Latar Belakang	I-1
I. 2. Landasan Hukum.....	I-2
I. 3. Maksud dan Tujuan	I-2
I. 4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	II-8
II. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-8
II. 2. Sumber Daya Manusia	II-20
II. 3. Kinerja Pelayanan.....	II-23
II. 4. Kelompok Sasaran Layanan	II-28
II. 5. Mitra Dalam Pemberian Pelayanan	II-30
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	III-32
III. 1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	III-32
III. 1. 1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.....	III-32
III. 1. 2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	III-34
III. 1. 3. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	III-35
III. 1. 4. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan	III-35
III. 2. Telaah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026	III-36
III. 3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036	III-39

III. 4. Telaah Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2011-2030	III-42
III. 5. Telaah Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019-2024	III-45
III. 6. Penentuan Isu Strategis	III-48
III. 6. 1. Kontribusi Sektor Kehutanan dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah.....	III-48
III. 6. 2. Penanganan dan Pengembangan Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Sektor Kehutanan	III-48
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-50
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	IV-52
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	VI-54
VI. 1. Rencana Program dan Kegiatan	VI-54
VI. 1. 1. Program Pengelolaan Hutan	VI-54
VI. 1. 2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	VI-54
VI. 1. 3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.....	VI-55
VI. 1. 4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	VI-55
VI. 1. 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.....	VI-55
VI. 2. Pendanaan	VI-56
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-72
VII. 1. Indikator capaian	VII-72
VII. 2. Target Kinerja.....	VII-77
BAB VIII. PENUTUP	VIII-96
BAB IX. LAMPIRAN	IX-98
Lampiran 1. Rencana Pendanaan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.....	IX-99
Lampiran 2. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan.....	IX-109
Lampiran 3. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	IX-114

Lampiran 4. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	IX-119
Lampiran 5. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	IX-125
Lampiran 6. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat.....	IX-130
Lampiran 7. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	IX-134
Lampiran 8. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah.....	IX-139
Lampiran 9. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	IX-144
Lampiran 10. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan.....	IX-149
Lampiran 11. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	IX-155
Lampiran 12. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam.....	IX-160
Lampiran 13. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau.....	IX-166
Lampiran 14. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	IX-171
Lampiran 15. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	IX-176
Lampiran 16. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus.....	IX-180
Lampiran 17. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn.....	IX-185
Lampiran 18. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	IX-190
Lampiran 19. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan	IX-194
Lampiran 20. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	IX-199

Lampiran 21. Rencana Pendanaan di UPTD Taman Hutan Raya Bukit
SoehartoIX-205

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Sumber Daya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	II-21
Tabel II.2. Tujuan dan Sasaran, serta Indikator, Target dan Capaian dalam periode sebelumnya	II-23
Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.....	II-25
Tabel III.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	II-26
Tabel II.5. Mitra Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	II-30
Tabel II.6. Mitra Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	II-31
Tabel III.1. Hasil Analisis Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2030	III-44
Tabel IV.1. Tujuan, Sasaran , Indikator dan Target Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.....	IV-51
Tabel V.1. Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	IV-52
Tabel VI.1. Rencana Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.....	VI-57
Tabel VII.1. Indikator Tujuan dan Sasaran	VII-73
Tabel VII.2. Indikator Kinerja Kunci	VII-74
Tabel VII.3. Target Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	VII-77

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016.....	II-10
Gambar II.2. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kelas A.....	II-17
Gambar II.3. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kelas A.....	II-19
Gambar II.4. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	II-20
Gambar III.1. Arahannya Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030	III-43
Gambar III.2. Peta Arahannya Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2030.....	III-45

BAB I. PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 (3), Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber daya hutan sebagai salah satu kekayaan alam negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk memberikan manfaat ekonomi, terutama bagi masyarakat, dengan tetap memastikan keberlangsungan manfaat ekologis.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki bentang alam hutan hujan tropis yang telah menopang perekonomian daerah dan nasional. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036, Provinsi Kalimantan Timur memiliki 1.844.969 hektare hutan lindung dan 6.055.793 hektare hutan produksi. Selain itu juga terdapat Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan seluas 591.690 hektare, di mana 64.814,98 hektare merupakan Taman Hutan Raya yang dikelola oleh Provinsi.

Kondisi hutan, sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran masyarakat, telah mengalami penurunan kualitas maupun kuantitasnya, sehingga harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara bijaksana, terbuka, profesional dan bertanggung-gugat. Salah satu upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas hutan, serta meningkatkan perekonomian daerah dan nasional, serta menyejahterakan masyarakat, memerlukan perencanaan pembangunan yang baik.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 menyebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan pembangunan daerah (provinsi), serta perencanaan strategis perangkat daerah. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, dan

diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024-2026 perlu disusun dan ditetapkan pada tahun 2023. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur, menyusun Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 ini.

I. 2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Renstra Dishut Kaltim) tahun 2024-2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841));
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6635);
 - f) Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor.249);
 - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
 - j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
- k) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MenLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 Tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim;
 - l) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 - m) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
 - n) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 70);
 - o) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);
 - p) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7);

- q) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Tahun 2011 – 2030 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 21), sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2018 Tentang PERUBAHAN Lampiran Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2030 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 55);
- r) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 71);
- s) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 40);
- t) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

I. 3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dishut Kaltim tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk:

- a) Menerjemahkan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya urusan pembangunan sektor Kehutanan, dengan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan perencanaan sektor kehutanan lainnya;
- b) Memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan bagi Dishut Kaltim dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur;
- c) Sebagai salah satu acuan pemantauan dan evaluasi bagi Dishut Kaltim, sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan secara transparan dan akuntabel.

Penyusunan Renstra Dishut Kaltim bertujuan untuk:

- a) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, serta

rencana program, kegiatan dan anggaran Dishut Kaltim tahun 2024-2026;

- b) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dishut Kaltim dan UPTD pada Dishut Kaltim setiap tahun selama periode Renstra.

I. 4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dishut Kaltim tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, merupakan pengantar dari dokumen ini yang berisi latar belakang penyusunan dokumen, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, berisikan tugas, fungsi dan struktur Dishut Kaltim, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, dan mitra Dishut Kaltim.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS, memberikan gambaran permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Dishut Kaltim berdasarkan capaian kinerja sebelumnya, serta isu strategis berkaitan dengan urusan pemerintahan sektor Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, memuat tujuan dan sasaran Renstra Dishut Kaltim Tahun 2024-2026, berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat strategi dan arah kebijakan Dishut Kaltim dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dishut Kaltim Tahun 2024-2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN, berisikan rincian program, kegiatan, dan pendanaan Dishut Kaltim Tahun 2024-2026.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dishut Kaltim melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penentuan target kinerja

penyelenggaraan urusan pemerintah sektor kehutanan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta targetnya.

BAB VIII. PENUTUP, merupakan bagian akhir dari dokumen ini yang menggaris- bawahi hal-hal penting saat ini maupun ke depan yang harus diperhatikan agar Renstra Dishut Kaltim dapat berjalan baik.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

II. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Kewenangan yang dimaksud mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.74/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 8 (delapan) fungsi antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi: tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL); rencana pengelolaan KPHP dan KPHL; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; pengolahan hasil hutan kayu; dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi;
- 3) Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di provinsi, meliputi: perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Tahura lintas Kabupaten/Kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi; dan pengelolaan kawasan bernilai

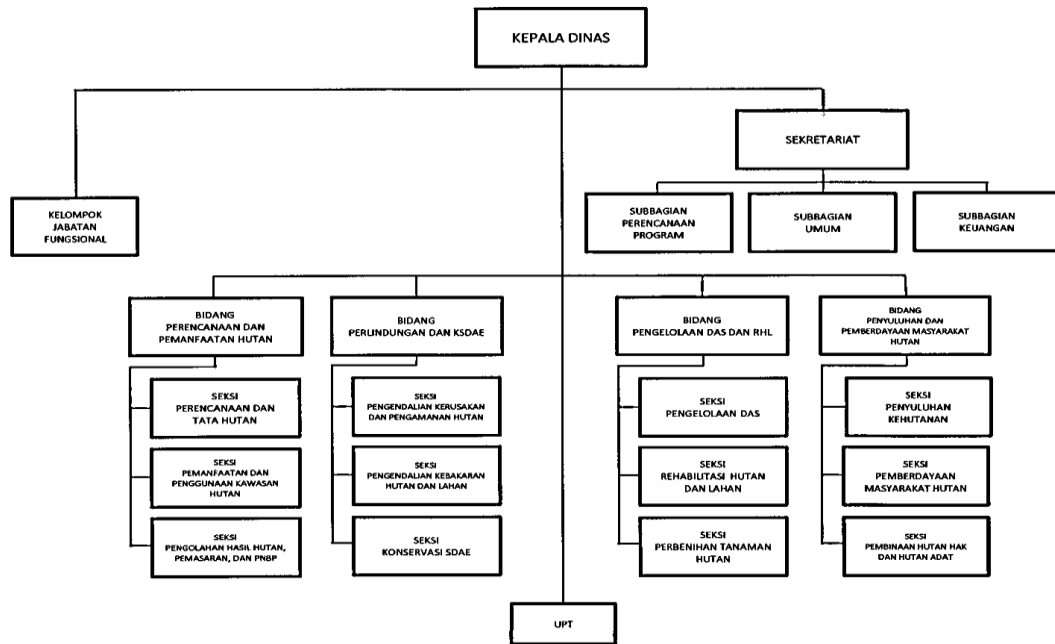
konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;

- 4) Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di provinsi;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan kehutanan di provinsi dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016, struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:

- a) Kepala Dinas,
- b) Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum
- c) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
 2. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan hutan
 3. Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- d) Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
 2. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
- e) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan DAS
 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 3. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan
- f) Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan, membawahkan:
 1. Seksi Penyuluhan Kehutanan

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan
3. Seksi Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat



Gambar II.1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016

Penjelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang dalam lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, pengelolaan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan program. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) Koordinasi rencana program dan anggaran
- b) Pengelolaan data dan informasi
- c) Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara, dan
- d) Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, serta hubungan masyarakat.

2) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan memiliki tugas pokok: merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan, pada kegiatan tata hutan, rencana pengelolaan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kecuali Kesatuan

Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), serta pemanfaatan hutan. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- b) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- c) Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
- d) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi pada wilayah provinsi;
- e) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah provinsi;
- f) Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah provinsi;
- g) Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi;
- h) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu
- i) (IPK), dan izin koridor di wilayah provinsi;
- j) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan dalam wilayah provinsi;

- k) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu;
 - l) Penyiapan penyelesaian sanksi terhadap pelanggaran administratif di bidang kehutanan di wilayah provinsi.
- 3) Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya bertugas: merumuskan kebijakan bersifat teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi, pelaksanaan perlindungan hutan di Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP), perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Tahura lintas Kabupaten/Kota, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES, dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya memiliki fungsi:

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- b) Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura) lintas Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam daftar lampiran (Appendix) CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*/Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam);
- d) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi di provinsi.

4) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mempunyai tugas pokok: merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengelolaan DAS di provinsi dan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; dan melaksanakan evaluasi mitigasi iklim dan emisi gas rumah kaca (GRK) urusan kehutanan. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) memiliki fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
- b) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, dan evaluasi rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/ penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;
- c) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan di dalam provinsi;
- d) Menyusun standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan;
- e) Melaksanakan koordinasi perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim pada urusan kehutanan termasuk KPH;
- f) Menyusun laporan pelaksanaan mitigasi perubahan iklim dan tingkat emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan.

5) Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan mempunyai tugas pokok: (1) merumuskan kebijakan bersifat teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan, kegiatan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat, perhutanan sosial, dan promosi mitigasi iklim. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan memiliki fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan bidang kehutanan dalam wilayah provinsi;
- b) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, kemitraan kehutanan dalam provinsi;
- c) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan perhutanan sosial yang meliputi: Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam provinsi;
- d) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi;
- e) Melaksanakan promosi upaya-upaya mitigasi perubahan iklim pada urusan kehutanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan Kalimantan Timur yang meliputi:

- a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang terdiri dari 17 (tujuh belas) UPTD dengan kedudukan dan wilayah kerja sebagai berikut;
 - 1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XII;
 - 2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XIV;
 - 3) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XV;
 - 4) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XV;
 - 5) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XVII;

- 6) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XVIII;
- 7) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau, Kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XIX;
- 8) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXVI;
- 9) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi San tan, Kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXVII;
- 10) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam, Kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXIX;
- 11) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXII;
- 12) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXIV;
- 13) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XX;
- 14) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXX;
- 15) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongon, Kelas A, berkedudukan di Kota Balikpapan, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXXI;
- 16) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXXIII ; dan
- 17) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Tanah Paser, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXXIV.

- b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terdiri atas 2 (dua) UPTD yaitu :
- 1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan, Kelas A, berkedudukan di Kota Balikpapan meliputi kawasan hutan pada KPHL Unit XXX; dan
 - 2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat meliputi kawasan hutan di Kabupaten Mahakam Ulu meliputi kawasan hutan pada KPHL Unit XXII.
- c. UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda.

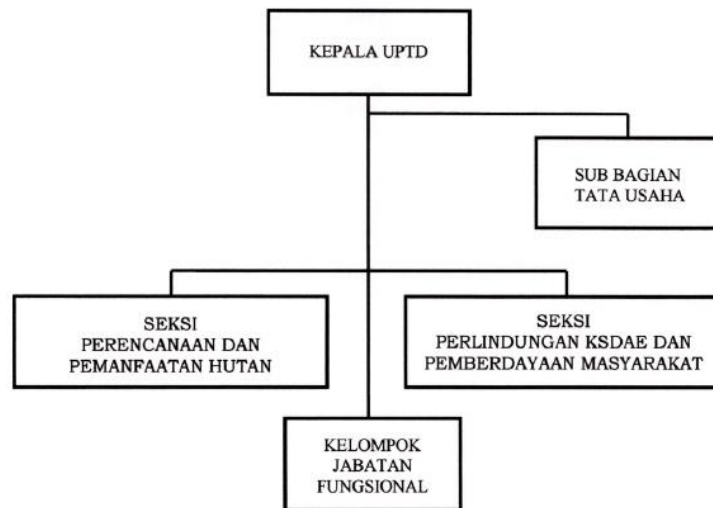
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPHP yang telah ditetapkan dan melakukan urusan ketatausahaan. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Hutan Produksi;
- b) pelaksanaan tata Hutan pada wilayah KPH;
- c) pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Hutan KPH;
- d) pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan di wilayah KPH;
- e) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
- f) pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH;
- g) pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH;
- h) pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan KPH;
- i) pengembangan investasi, keaja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- j) pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan Hutan;
- k) pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;

- l) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- m) pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar Kawasan Hutan;
- n) pengelolaan urusan ketatausahaan; pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- o) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan. Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelas A, terdiri atas :

- a) Kepala UPTD;
- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d) Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar II.2. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kelas A

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPHL yang telah ditetapkan dan melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Hutan Lindung ;
- b) pelaksanaan tata Hutan pada wilayah KPH;

- c) pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Hutan KPH;
- d) pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan di wilayah KPH;
- e) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
- f) pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH.
- g) pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH;
- h) pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan KPH;
- i) pengembangan investasi, kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- j) pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan Daerah dalam pengelolaan Hutan;
- k) pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- l) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- m) pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar Kawasan Hutan;
- n) pengelolaan urusan ketatausahaan;
- o) pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- p) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan. Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, terdiri atas:

- a) Kepala UPTD;
- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d) Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar II.3. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kelas A

UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/Kota dan melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Tahura Bukit Soeharto;
- b) pelaksanaan inventarisasi potensi, tata kawasan Tahura lintas Kabupaten / Kota;
- c) pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- d) pelaksanaan perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- e) pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- f) pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusaha pariwisata alam pada kawasan Tahura lintas Kabupaten / Kota;
- g) pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- h) pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/Kota.
- i) pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota.

- j) pelaksanaan penerimaan PNBPN dalam pemanfaatan SDH di kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota.
- k) pengembangan sistem informasi dan database pengelolaan Tahura.
- l) pengelolaan urusan ketatausahaan;
- m) pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- n) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, terdiri atas :

- a) Kepala UPTD;
- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d) Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar II.4. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

II. 2. Sumber Daya Manusia

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Januari 2023 memiliki jumlah pegawai sebanyak 603 orang dengan rincian sebagaimana dalam Tabel II.1. Berdasarkan tingkat Pendidikan, terdapat 12,27% berpendidikan S2 (Magister); 40,13% berpendidikan S1 (Sarjana), 11,61% Diploma yang terdiri dari Diploma 3 dan Diploma 2, 33,00% berpendidikan SLTA dan 1,99 % berpendidikan SLTP, serta 1,00 % berpendidikan Sekolah Dasar. Terkait dengan kompetensi manajerial yang dimiliki sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan Kaltim dalam menunjang kinerja

pelayanan, tercatat sebanyak 116 orang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM dan Adum), dan saat ini telah menduduki jabatan pada level pratama (1 orang), level administrator (13 orang), level pengawas sebanyak 41 orang dan pada level pelaksana sebanyak 703 orang.

Tabel II.1. Sumber Daya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

NO	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
1.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kepala Bidang Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	4	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	12	1	9	3	-	-	9	3	-	-	-	-
	Pelaksana Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	94	29	6	92	25	-	8	60	5	49	1	-
2	Kepala UPTD KPHP Batu Ayau	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Batu Ayau	3	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Batu Ayau	11	2	-	8	5	-	-	5	4	4	-	-
3	Kepala UPTD KPHP Bengalon	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Bengalon	2	1	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Bengalon	12	7	-	14	5	-	2	10	2	4	1	-
4	Kepala UPTD KPHP Berau Barat	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTDKPHP Berau Barat	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Berau Barat	10	2	-	6	5	1	-	4	1	6	-	1
5	Kepala UPTD KPHP Bongan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Bongan	2	1	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Bongan	15	5	-	15	5	-	1	2	4	12	1	-
6	Kepala UPTD KPHP DAS Belayan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP DAS Belayan	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP DAS Belayan	16	4	-	15	5	-	1	8	2	9	-	-
7	Kepala UPTD KPHP	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-

NO	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLT A	SLT P	SD
	Telake												
	Kepala Seksi UPTD KPHP Telake	3	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Telake	10	2	-	6	6	-	-	6	5	1	-	-
18	Kepala UPTD KPHP Manubar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Manubar	3	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Manubar	14	5	-	15	4	-	1	10	2	6	-	-
19	Kepala UPTD KPHP Kelinjau	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Kelinjau	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Kelinjau	13	7	-	18	2	-	1	11	1	8	-	-
20	Kepala UPTD KPHL Balikpapan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHL Balikpapan	1	2	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHL Balikpapan	15	1	-	14	-	2	-	5	2	7	-	2
21	Kepala UPTD KPHP Delta Mahakam	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Delta Mahakam	3	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Delta Mahakam	23	6	-	22	7	-	1	11	7	9	-	1
J U M L A H		478	125	58	41	12	6	74	242	70	199	12	6
JUMLAH PNS		603											

II. 3. Kinerja Pelayanan

Renstra Dishut Kaltim Tahun 2019-2023 telah menetapkan Tujuan dan Sasaran serta target sebagai berikut:

Tabel II.2. Tujuan dan Sasaran, serta Indikator, Target dan Capaian dalam periode sebelumnya

Tujuan /Sasaran	Indikator	Satuan	Target					Capaian			
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
Tujuan: Meningkatnya Peran Sektor Kehutanan terhadap Ekonomi Daerah	Kontribusi Lapangan Usaha Subsektor Kehutanan terhadap PDRB	%	1,00	1,05	1,06	1,07	1,08	0,93	1,13	1,49	0,81
Sasaran: Meningkatkan penerimaan PNPB Sektor Kehutanan	Jumah Penerimaan PNPB Sektor Kehutanan	Miliar Rupiah	185	190	125	125	125	184	135	264	224

Berdasarkan Tabel II.2, dapat dilihat bahwa Tujuan dan Sasaran Renstra Dishut Kaltim tahun 2019-2023 belum mencapai target yang ditetapkan.

Kondisi ini disebabkan oleh situasi Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak akhir Desember 2019 dan mulai merebak di Indonesia pada Maret 2020, serta mencapai puncak gelombang pertama pada Agustus 2020 dan berulang Kembali pada medio 2021. Pada tahun 2022, situasi pandemi berlangsung menurun, seiring dengan meningkatnya penerima vaksin dan tersedianya pengobatan yang lebih baik di berbagai tempat. Kondisi ini menjadikan ekonomi Kembali bergerak, termasuk untuk sub-sektor Kehutanan. Ini juga ditandai dengan meningkatnya kembali capaian, walaupun masih belum mencapai kondisi yang ditargetkan.

Tabel II.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

No	Program	Indikator	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
							2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.) Produksi Hasil Hutan Kayu	M3				4.950.000	5.000.000	5.050.000	4.798.049,68	4.470.460,11	5.050.000	96,93	89,41	100
		2.) Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton				670	700	730	694,28	826,05	730	103,62	118,98	100
2	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	%				1,25	1,25	1,25	0,12	0,12	1,25	100	100	100
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat	Hektare				32.000	32.000	32.000	25.942	48.258	32.000	81,07	150,81	100

4	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	%				8	13,98	13,98	14,4	14,12	13,98	180	101	100
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%				82	83	84	82	83	84	100	100	100

Tabel II.4.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

No	Program	Anggaran			Realisasi			Rasio Capaian			Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	245.092.289.426	112.009.940.674	211.282.101.422	97.904.199.304	74.141.066.287	211.282.101.422	39,95	66,19	100	17,16	80,35
2	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	4.526.788.600	1.681.530.750	12.649.911.900	552.143.752	1.561.643.415	12.649.911.900	12,20	92,87	100	294,72	446,44
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	40.644.411.176	31.031.406.328	50.959.096.932	17.264.230.139	25.806.300.490	50.959.096.932	42,48	83,16	100	20,28	73,47
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1.303.750.000	2.385.054.500	3.578.275.000	1.117.339.399	1.585.978.092	3.578.275.000	85,70	66,50	100	66,48	83,78
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	172.387.395.500	383.200.535.778	279.262.240.433	131.597.622.269	142.250.904.197	279.262.240.433	76,34	37,12	100	47,58	52,21

II. 4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan

II. 4. 1. Tantangan

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Kehutanan Kalimantan Timur sangat dipengaruhi dengan perubahan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan, terutama dengan diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021. Walaupun tidak terdapat pengaturan baru di sektor kehutanan dalam UU dan PP tersebut, namun secara pelaksanaan, fungsi KPH dikembalikan sebagai unit pelayanan dan fasilitasi. Kewenangan Pemerintah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014, yang diuraikan lebih lengkap dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan SK Mendagri sebagai pemutakhiran nomenklatur.

Tantangan lain adalah pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi hutan dan lahan hanya dapat dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan KPH pada areal penggunaan lain (APL) ataupun Taman Hutan Raya provinsi. Namun untuk rehabilitasi di Taman Hutan Raya, masih belum tersedia nomenklatur spesifik terkait sub-kegiatan tersebut. Dalam menentukan lokasi pelaksanaan rehabilitasi, reboisasi dan penghijauan pun masih mengalami kesulitan, dikarenakan sebagian Kawasan areal penggunaan lain (APL) telah dibebani perijinan penggunaan dan pemanfaatan lahan.

Tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan KPH dalam pengelolaan hutan, terutama dalam areal pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan, terbatas pada koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Izin Usaha atau kerja sama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hal ini memerlukan koordinasi yang erat dengan UPT KLHK di provinsi. Tantangan ini juga semakin meningkat, di mana produksi hasil hutan kayu merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar untuk sektor kehutanan, namun angka produksi hasil hutan kayu tidak mengalami peningkatan signifikan, dan memiliki kecenderungan semakin menurun di masa datang.

Kebijakan baru di Uni Eropa terkait pencegahan deforestasi telah diberlakukan, melalui EU Deforestation Regulation (EUDR) yang diadopsi pada 19 April 2023 dan mulai diberlakukan pada 16 Mei 2023. Kebijakan Uni Eropa tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko penggundulan hutan, terhadap produk yang diekspor ke pasar Eropa, utamanya minyak sawit, sapi, kayu, kopi, kakao, karet hingga kedelai. Kebijakan ini akan

berdampak pada pasar kayu Kalimantan Timur yang menjadikan Eropa sebagai tujuan ekspor.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang belum sebanding dengan luas Kawasan hutan yang dikelola Dinas Kehutanan dan KPH, termasuk dengan terbatasnya perekrutan aparatur sipil negara (ASN) yang baru, menjadikan proses pemenuhan jumlah tenaga teknis lapangan dan proses peningkatan kapasitas SDM memiliki tantangan yang besar.

II. 4. 2. Peluang

Peluang yang mulai dibuka untuk sektor kehutanan adalah dengan adanya Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021, yang mempersiapkan pelaksanaan nilai ekonomi karbon. Peluang provinsi hanya pada berharap adanya pembagian insentif ataupun keuntungan oleh Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang melaksanakan ekonomi karbon. Pun dengan menurunnya nilai pasar “Nature Based Solution” dalam Perdagangan Karbon, dapat menjadikan usaha pemanfaatan hutan dalam kerangka nilai ekonomi karbon masih belum terlalu menarik bagi pengusaha.

Peluang lain dalam pengembangan perhutanan sosial disediakan dalam Pasal 193 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial melalui mengembangkan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial (integrated area development/IAD). Dengan pelaksanaan IAD, dimungkinkan kontribusi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah nasional, serta pihak di luar pemerintah, serta dilakukan lintas sektor, dapat berkontribusi bagi percepatan pelaksanaan perhutanan sosial dengan berbagai macam kegiatan untuk menguatkan kapasitas pelaksana perhutanan sosial.

Peluang lain yang masih terbuka adalah meningkatkan produk hasil hutan bukan kayu, yang memerlukan upaya kuat untuk memperkuat rantai pasok hasil hutan bukan kayu, termasuk membangun kerja sama di luar sektor kehutanan, terutama membangun industri perantara dan industri hilir produk non kayu.

II. 5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan terdiri dari masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan hutan, perijinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), lembaga perhutanan sosial, kelompok usaha perhutanan sosial, kelompok tani hutan, dan masyarakat peduli api.

II. 6. Mitra Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pemberian pelayanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melakukan bersama lembaga lain, diantaranya adalah:

Tabel II.5. Mitra Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

No	Lembaga	Peran Mitra
1.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari wilayah XI, KLHK	<ul style="list-style-type: none"> a) fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; b) fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; c) pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
2.	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan wilayah IV, KLHK	<ul style="list-style-type: none"> a) pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; b) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; c) penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; d) penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
3.	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kalimantan, KLHK dan Seksi Wilayah III di Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> a) pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan pengelolaan perhutanan sosial; b) pemetaan konflik tenurial kawasan hutan; c) pelaksanaan inventarisasi kearifan lokal; d) fasilitasi penataan areal kerja persetujuan perhutanan sosial; e) fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial; f) fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial; g) pelaksanaan fasilitasi kemitraan lingkungan; h) penetapan pendamping perhutanan sosial; i) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial; j) fasilitasi pendampingan perhutanan sosial; k) penyediaan data dan informasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; l) pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
4.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur, KLHK	<ul style="list-style-type: none"> a) pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan; b) evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; c) penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK); d) penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; e) koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar; f) koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial; g) pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; h) pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
5.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	<ul style="list-style-type: none"> a) penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai dan rancangan kegiatan rehabilitasi hutan,

No	Lembaga	Peran Mitra
	Mahakam Berau, KLHK	lahan, perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air; b) pembangunan model pengelolaan daerah aliran sungai; c) pelaksanaan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove serta konservasi tanah dan air; d) pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove serta konservasi tanah dan air; e) penguatan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air; f) penyajian data dan informasi pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air

Selain dengan Kementerian, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur juga bekerja sama dengan mitra pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, dalam kerangka mencapai tujuan pembangunan sektor kehutanan. Adapun mitra pembangunan tersebut diantaranya adalah:

Tabel II.6. Mitra Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

No	Lembaga	Peran Mitra
1.	UNDP Kalimantan Forest Project	Pengelolaan Kawasan berhutan di luar Kawasan hutan di Kabupaten Kutai Timur
2.	USAID-Segar	Peningkatan implementasi tujuan keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam rantai pasok produksi komoditas sumber daya alam yang menurunkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan menurunkan emisi gas rumah kaca dari pemanfaatan lahan, melalui perhutanan sosial.
3.	GIZ-Propeat	Pengelolaan dan Rehabilitasi Gambut-Lahan Basah di Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Berau
4.	Global Green Growth Institute	Pengembangan dan penguatan kapasitas bisnis rendah karbon, termasuk perhutanan sosial.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

III. 1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan diidentifikasi berdasarkan bidang yang ada dalam lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

III. 1. 1. BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN

Kawasan hutan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibagi ke dalam 20 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang terdiri dari 18 unit KPH Produksi dan 2 unit KPH Lindung, serta 1 Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Unit KPH dan Tahura dikelola oleh 1 Unit Pelaksana Teknis Dinas, kecuali untuk unit KPH Samarinda yang dikelola dalam bentuk Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) oleh Universitas Mulawarman. Pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan Undang-Undang terkait Kehutanan dan Pemerintahan Daerah. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebabkan diperlukannya perubahan dari rencana pengelolaan hutan, dalam hal ini Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang.

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektor Kehutanan juga menempatkan kewenangan terbatas dalam pemanfaatan hutan. Bilamana sebelumnya UPTD KHP dan Tahura dapat melakukan pemanfaatan Kawasan hutan, namun kemudian UPTD KPH dan Tahura berperan sebagai fasilitator dalam pemanfaatan Kawasan hutan. Perubahan kebijakan pemanfaatan hutan juga mengubah penyebutan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu menjadi Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, yang dapat melakukan pemanfaatan hutan dengan multi-usaha kehutanan.

Dari pemanfaatan hutan tersebut, kontribusi subsektor kehutanan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif namun jika dilihat secara umum maka terjadi kenaikan. Dalam empat tahun terakhir, Pada tahun 2019 kontribusi subsektor kehutanan sebesar Rp. 1,12 Milyar, lalu terjadi kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1,13 Milyar. Kontribusi terbesar subsektor kehutanan terjadi pada tahun 2022 yang mencapai Rp. 1,17 Milyar

sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan kontribusi terendah yakni sebesar Rp. 1,04 Milyar.

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan berasal dari hutan alam dan tanaman. Produksi hasil hutan kayu mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 4.104.271,21 m³ menjadi 3.042.557,42 m³ di triwulan ketiga tahun 2022, hal tersebut disebabkan adanya faktor penghambat yaitu curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun, yang berakibat kepada terganggunya kegiatan produksi kayu, dan biaya operasional produksi kayu yang meningkat karena naiknya harga BBM, diikuti dengan kenaikan biaya sparepart dan biaya perawatan kendaraan, sementara harga jual produksi kayu bulat tidak naik signifikan, malah cenderung turun pada beberapa bulan menjelang akhir tahun 2022, serta lesunya permintaan pasar dunia (ekspor) terhadap produk-produk olahan kayu terutama dari negara Eropa pada beberapa bulan terakhir (yang sedang menghadapi musim gugur di bulan September hingga November 2022). Perkiraan capaian hasil hutan kayu akan meningkat sebesar 4.247.600,41 m³. Hal tersebut disebabkan adanya faktor pendorong yaitu sudah ada peraturan yang menegaskan batas minimal realisasi produksi yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yaitu minimal 50%. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021). Tidak hanya hasil hutan kayu, produksi hasil hutan bukan kayu juga mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2021 sebesar 1.175,38 ton menjadi 658,26 ton di triwulan ketiga tahun 2022 dengan target 700 ton. Walaupun demikian, perkiraan capaian di triwulan keempat optimis 100% target akan tercapai, hal tersebut disebabkan karena tanaman karet sudah masuk usia siap panen. Adapun rumusan permasalahan dan akar masalah pada bidang ini adalah:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terwujudnya diversifikasi ekonomi sub sektor kehutanan	Belum optimalnya Pemanfaatan Hutan yang Berkelanjutan	Belum optimalnya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
		Belum optimalnya Pembinaan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun
		Belum optimalnya Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Belum terwujudnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Belum optimalnya Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan	Penyusunan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi yang belum optimal
		Penyusunan Rencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) yang masih belum optimal.

III. 1. 2. BIDANG PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Pengawasan terhadap gangguan hutan tidak dilakukan jauh di provinsi, namun menjadi efektif ketika dilakukan oleh KPH yang berada dekat dengan lokasi. Walaupun pada level tertentu, harus memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah di luar kawasan hutan. Persentase pencegahan kerusakan hutan pada tahun 2022 sebesar 0,12% dan persentase pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2022 sebesar 0,0012%. Beberapa pencegahan kerusakan hutan yang dilakukan adalah patroli pencegahan kerusakan hutan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi pencegahan kerusakan hutan serta pembentukan dan pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Dan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan kegiatan belanja sarana prasarana Karhutla (perlengkapan lapangan, alat pemadam kebakaran/selang pemadam, pompa air mesin pemadam, drone pemantau kebakaran hutan) patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi penyadartahuan kebakaran hutan, pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Namun hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan jumlah personil Polisi Kehutanan, Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api masih belum memadai.

Adapun rumusan permasalahan dan akar masalah pada bidang ini adalah:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terwujudnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Belum optimalnya Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan	Belum Optimalnya kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat
	Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP) dan Konservasi Provinsi	Belum optimalnya pengelolaan Tahura Provinsi
		Belum optimalnya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi
		Belum Optimalnya perencanaan dan pengelolaan multi-pihak kawasan bernilai

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

III. 1. 3. BIDANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2018, Luas Lahan Kritis di Provinsi Kalimantan Timur seluas 275.272 Hektar (diperbaharui setiap 5 tahun). Pada tahun 2018 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 38.771,77 hektare. Pada tahun 2019 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami peningkatan seluas 66.302,27 hektare. Pada tahun 2020 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami penurunan seluas 38.737,80 hektare. Pada tahun 2021 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 39.900,80 hektare dan pada tahun 2022 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 1.144,00 hektare. Jumlah total lahan kritis yang direhabilitasi hingga tahun 2022 adalah 184.856,64 hektare dengan persentase 67,15%.

Adapun rumusan permasalahan dan akar masalah pada bidang ini adalah:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terwujudnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Belum optimalnya Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan	Terhambatnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas bibit tanaman melalui sertifikasi sumber benih.
	Belum Optimalnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dan pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu multi pihak yang belum terintegrasi.

III. 1. 4. BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur pada tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat. Pada tahun 2022, perkembangan perhutanan sosial mencapai 111 unit dengan luas sebesar 237.426 hektare.

Lambatnya implementasi disebabkan oleh faktor karakter program yang tidak luwes dalam menghadapi kondisi riil di lapangan seperti keterbatasan areal, rendahnya kapasitas banyak kelompok masyarakat dan ruang yang terbatas bagi modifikasi skema di tingkat lapangan. Hingga tahun 2022 baru mencapai 2 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan kategori Gold, 37 kategori Silver, 68 kategori Green dan 107 kategori Blue.

Adapun rumusan permasalahan dan akar masalah pada bidang ini adalah:

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum terwujudnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Belum Optimalnya Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan	Masih Kurangnya kuantitas dan kapasitas penyuluh kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

III. 2. Telaah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kaltim tahun 2024-2026 harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan Penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dengan mengacu pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2025, dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036, serta memperhatikan: (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan. Keempat tujuan pembangunan dan sasaran strategisnya diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing
Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing yang dimaksud adalah SDM yang memiliki IPM tinggi dan terus meningkat serta tidak ada kabupaten/kota dengan IPM tertinggal (di bawah rata-rata nasional). Selain itu, menurunnya TPT sebagai dampak diserapnya tenaga kerja lulusan SMK/ sederajat keatas juga menjadi ukuran keberhasilan peningkatan daya saing SDM. Perwujudan daya saing SDM dilakukan dengan pemerataan taraf pendidikan, pemerataan kesehatan, peningkatan usia harapan hidup, dan pemberdayaan gender.

- 1.1. Sasaran 1. Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat;
 - 1.2. Sasaran 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - 1.3. Sasaran 3. Meningkatnya daya saing tenaga kerja;
 - 1.4. Sasaran 4. Meningkatnya daya saing perempuan.
2. Tujuan 2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
- Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi yang tumbuh stabil dan ketahanan dengan tidak mengandalkan pada sektor ekstraktif, sehingga dilakukan diversifikasi ekonomi (horizontal dan vertikal) pada sektor ekonomi unggulan untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh pada kisaran 3-5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga harus mampu menyejahterakan masyarakat yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan. Dampak yang dirasakan dari pertumbuhan ekonomi juga harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat berkurang.
- 2.1. Sasaran 5. Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi;
 - 2.2. Sasaran 6. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
 - 2.3. Sasaran 7. Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar
3. Tujuan 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
- Tujuan ini diarahkan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air, air laut, udara, lahan, bersinergi dengan upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca serta mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
- 3.1. Sasaran 8. Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Tutupan Lahan;
 - 3.2. Sasaran 9. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan;
 - 3.3. Sasaran 10. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
4. Tujuan 4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
- Tujuan ini dimaksudkan untuk penerapan *core value* ASN yang profesional serta mendukung pelayanan publik yang berjalan dengan standar kualitas yang baik dan inovatif sehingga mampu memberikan kepuasan layanan bagi seluruh kelompok sasaran, khususnya bagi masyarakat.

4.1. Sasaran 11. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang didukung ASN BerAKHLAK

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 tersebut, maka yang berkaitan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1) Tujuan 2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

a) Sasaran 5. Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi

Berdasarkan Aspek Makro dimana dengan Akar Masalah Masih rendahnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dalam Arti Luas, maka perlu dirumuskanlah Arah Kebijakan, yaitu:

- Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas subsektor kehutanan

Dengan Program prioritas:

- Program pengelolaan hutan

2) Tujuan 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

a) Sasaran 9. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan`

Berdasarkan Aspek Makro dimana dengan Masalah Pokok Meningkatnya Resiko Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Akar Masalah:

- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan.
- Belum optimalnya perlindungan hutan dan pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting (KBEP) dan konservasi provinsi.
- Belum optimalnya penyelenggaraan Rehabilitasi hutan dan lahan serta belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- Belum optimalnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan

Maka perlu dirumuskanlah Arah Kebijakan, yaitu:

- Peningkatan pengelolaan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.
- Meningkatkan upaya pengelolaan TAHURA provinsi.
- Meningkatkan upaya perlindungan Tumbuhan dan satwa liar
- Optimalisasi pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat

- Optimalisasi Pengelolaan DAS terpadu multipihak
- Optimalisasi penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan
- Pemberian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat berbasis perhutanan sosial

Program prioritas:

- Program pengelolaan hutan
- Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)
- Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan

3) Tujuan 4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

- a) Sasaran 11. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang didukung ASN BerAKHLAK

III. 3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (RTRWP Kaltim) tahun 2016-2036, yang ditetapkan dengan Perda Kaltim No. 1 tahun 2016 bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi, meliputi:

- a. pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan menjadi sektor unggulan provinsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat;
- b. pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumber daya migas dan batu bara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi wilayah dan nasional;
- c. perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau;
- d. perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi; dan

- e. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan.

Adapun strategi yang berkaitan dengan sektor Kehutanan adalah strategi perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau, meliputi:

- a. penurunan emisi dan jejak karbon dari sektor-sektor ekonomi produktif dalam perwujudan pemanfaatan ruang;
- b. penguatan prinsip kerja sama dalam konservasi hutan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah kawasan lindung dan wilayah Heart of Borneo (HoB); dan
- c. penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi ekonomi hijau.

Di dalam Pola Ruang RTRWP Kaltim, terdapat Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 1.844.969 hektare, Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan seluas kurang lebih 591.690 hektare, dan kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas kawasan kurang lebih 6.055.793 hektare.

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung, meliputi:

- a. arahan pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan (budidaya jamur, penangkaran satwa, budidaya tanaman obat dan tanaman hias, budidaya perlebahan dan budidaya sarang burung walet), pemanfaatan jasa lingkungan (wisata alam, pemanfaatan air, keindahan dan kenyamanan, usaha olahraga tantangan), dan pemungutan hasil hutan non kayu (rotan, madu, buah-buahan dan perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional) serta pendidikan dan penelitian;
- b. pembatasan dalam kawasan hutan lindung hanya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian dan wisata alam secara terbatas;
- c. pemanfaatan dalam kawasan hutan lindung untuk rehabilitasi lahan, pembinaan habitat dan pembinaan kawasan serta pengurangan dan penambahan jumlah populasi suatu jenis, baik asli atau bukan asli ke dalam kawasan;

- d. pelarangan dalam kawasan hutan lindung untuk kegiatan yang bersifat merubah bentang alam termasuk kegiatan pertambangan terbuka; dan
- e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya, meliputi:

- a. arahan pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya kawasan cagar alam, budaya dan wisata alam;
- b. arahan pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain taman hutan raya;
- c. arahan pembatasan di dalam zona pemanfaatan taman hutan raya, untuk pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan;
- d. arahan pemanfaatan untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, dengan memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman hutan raya serta mengikutsertakan masyarakat; dan
- e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi, meliputi:

- a. arahan pemanfaatan ruang untuk Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
- b. arahan pemanfaatan untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. arahan pembatasan/pengendalian pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan neraca sumber daya hutan;
- d. arahan pembangunan sarana dan prasarana dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan; dan

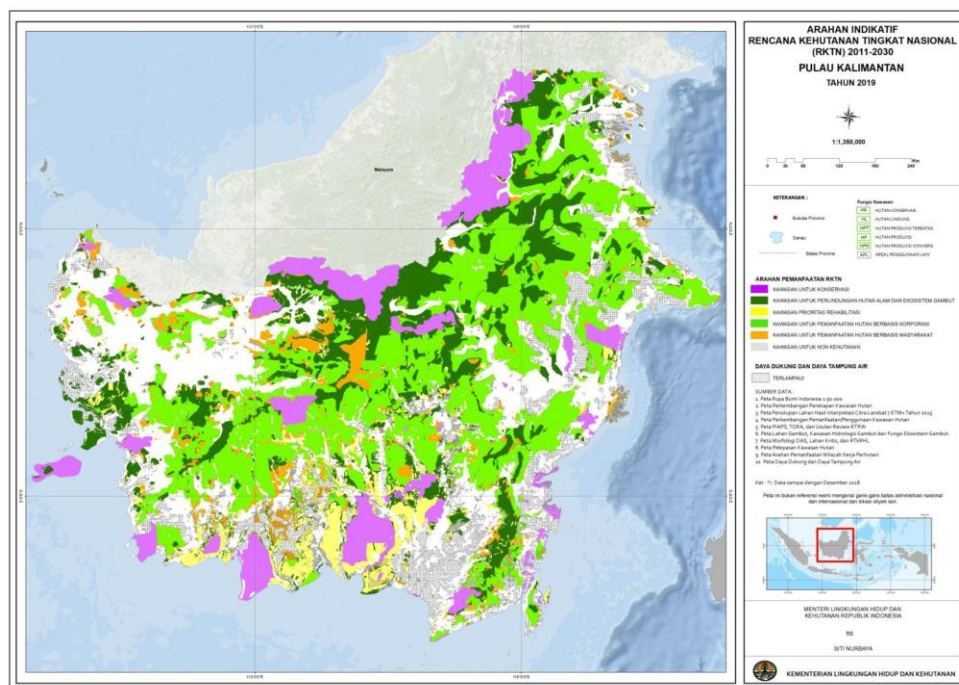
- e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah ditetapkan berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terintegrasi dalam rencana peruntukan struktur dan pola ruang RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Rincian Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perda Kaltim No. 1 tahun 2016.

III. 4. Telaah Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2011-2030

KLHK telah melakukan pembaharuan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional melalui Permen LHK No. P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030. Prioritas Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Pulau Kalimantan di dalam RKTN Tahun 2011-2030, adalah:

- Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan dan hutan hak
- Menyelesaikan masalah kawasan hutan
- Peningkatan peran konservasi
- Efisiensi usaha kehutanan dan pengembangan Sustainable Forest Management (SFM) bagi usaha kehutanan
- Pengembangan hutan tanaman.
- Pengembangan industri kehutanan
- Mempertahankan daya dukung dan daya tampung air pada kawasan hutan



Gambar III.1. Arahlan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030

Dinas Kehutanan Kaltim juga telah menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) tahun 2011-2030, yang ditetapkan melalui Pergub Kaltim No. 19 tahun 2012, yang kemudian diubah melalui Pergub Kaltim No. 55 tahun 2018. Berdasarkan RKTP tersebut, visi pembangunan kehutanan ke depan adalah: “Pembangunan kehutanan yang terpadu dan berkelanjutan (*integrated sustainable forestry development*) di Kalimantan Timur”. Secara terinci cakupan dari Visi tersebut di atas adalah :

- a. Pembangunan kehutanan yang terpadu, berarti :
 - Memadukan antara tujuan efisiensi ekonomi, integritas ekologi, keadilan sosial dan identitas budaya
 - Memadukan antara kepentingan vertikal (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan kepentingan horisontal (antar sektor) dan spasial (hulu dan hilir, kawasan kehutanan dan non-kehutanan)
- b. Pembangunan Kehutanan yang berkelanjutan, berarti:
 - Menyinambungkan antara kepentingan generasi sekarang dengan kepentingan generasi yang akan datang;
 - Menyinambungkan antara kebutuhan produk/jasa (industri dan pasar) dan kapasitas pasokannya (sumber daya dan tapak).

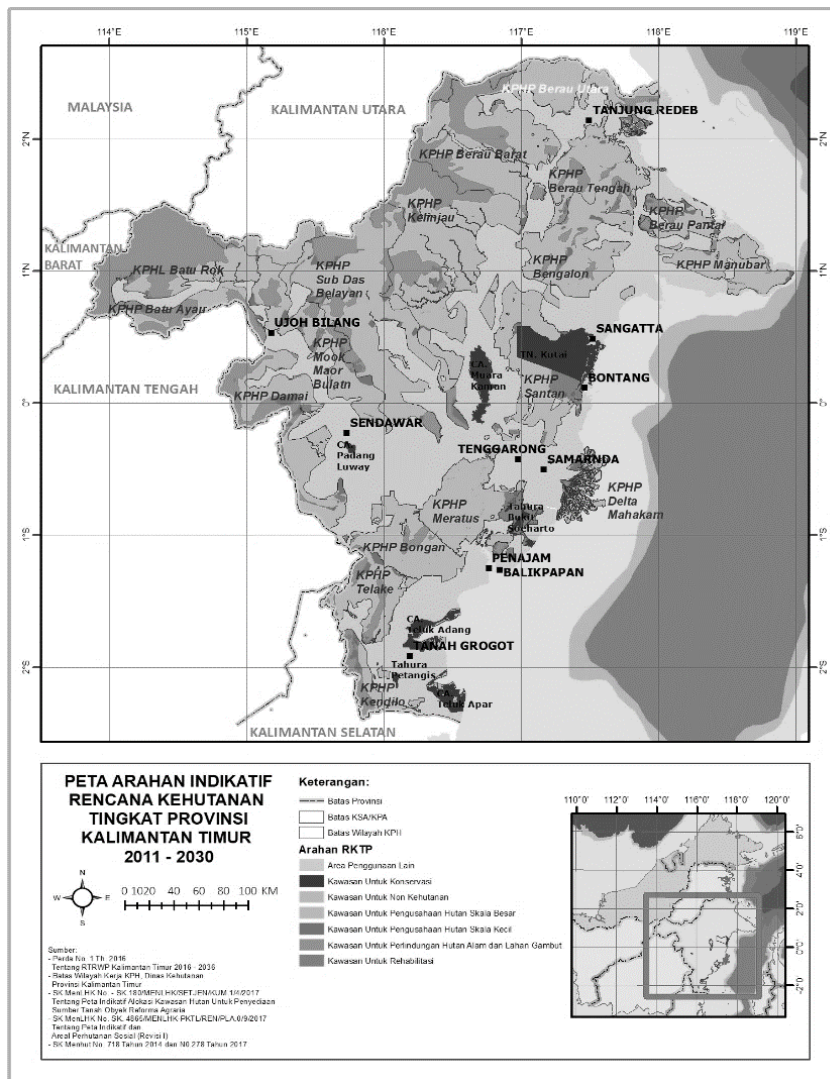
Misi untuk mencapai visi pengurusan hutan provinsi adalah:

- Misi 1. Optimalisasi tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, termasuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, serta pengembangan multi-produk kehutanan.
- Misi 2. Meningkatkan upaya perlindungan, pelestarian, serta pemulihan kawasan hutan.
- Misi 3. Memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, termasuk penyelesaian konflik kehutanan dan memperkuat perhutanan sosial.
- Misi 4. Meningkatkan kapasitas pengelola kawasan hutan, utamanya penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Arahan indikatif RKTP Kaltim tahun 2011-2030:

Tabel III.1. Hasil Analisis Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2030

No.	Arahan/Rencana	Luas (Hektare)
1.	Kawasan untuk Konservasi	326.413
2.	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	1.704.171
3.	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	171.662
4.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	5.325.861
5.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	671.689
6.	Kawasan untuk Non Kehutanan	160.513
	Jumlah	8.360.308



Gambar III.2. Peta Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2030

III. 5. Telaah Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019-2024

Visi Indonesia 2045 dan Visi dan Misi Presiden 2020-2024 menerjemahkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang dituangkan kedalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Dari 7 PN, Kementerian LHK mendukung pada 4 (empat) PN yaitu: (PN1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, (PN2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (PN3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan (PN 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Pada PN 1, Kementerian LHK mendukung Program Prioritas (PP) 2 peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi, dan PP 6 peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Kegiatan Prioritas (KP) pada PP 2 diantaranya pemantapan kawasan berfungsi lindung, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumberdaya air dan ekosistemnya. KP pada PP 6 diantaranya peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir, serta peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok. Pada PN 2, Kementerian LHK mendukung PP 4 pembangunan wilayah Pulau Kalimantan, KP pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung pembangunan ibu kota negara. Pada PN 3, Kementerian LHK mendukung PP 6 pengentasan kemiskinan dan PP 7 peningkatan produktivitas dan daya saing. KP pada PP 6 diantaranya keberantaraan usaha dan dampak sosial, reforma agraria, dan perhutanan sosial. KP pada PP 7 yaitu pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri.

Pada PN 6, Kementerian LHK mendukung PP 1 peningkatan kualitas lingkungan hidup, PP 2 peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan PP 3 pembangunan rendah karbon. KP pada PP 1 diantaranya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan dan kerusakan SDA LH, penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang SDA dan LH. KP pada PP 2 yaitu peningkatan ketahanan iklim. KP pada PP 3 diantaranya pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta rendah karbon pesisir dan laut.

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renstra Kementerian LHK) Tahun 2020-2024 sebelumnya yang ditetapkan melalui Permen LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/ SET.1/8/2020, yang kemudian dilakukan perubahan Renstra KLHK tahun 2020-2024 dan ditetapkan dengan Permen LHK No. 1 tahun 2022. Visi KLHK adalah “Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Pada pernyataan Visi KLHK tersebut, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni: Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan

tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya; Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Misi yang akan dijalankan berjumlah empat yang merepresentasikan tujuan dan sasaran strategisnya, masing-masing mewakili 4 pilar yaitu lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola, yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan:

1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim
2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup
3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan
4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima

Sasaran strategis untuk Pilar Lingkungan, kondisi lingkungan hidup dan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim, adalah: (a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; (b) Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah; (c) Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon; dan (d) Menurunnya laju penyusutan hutan. Sasaran strategis pilar ekonomi, aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup, adalah : (a) Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah; (b) Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan; (c) Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan *bioprospecting*; (d) Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pilar sosial, pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan, memiliki sasaran strategis: (a) terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate; (b) Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan

hutan; (c) Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata. Sedangkan pilar tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, memiliki sasaran strategis: (a) Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas; dan, (b) Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Milestone pembangunan LHK pada tahun 2024 adalah ekonomi sirkular dan keberdayaan masyarakat akses kelola telah menjangkau di seluruh provinsi, seiring perbaikan kondisi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin merata.

Dinas Kehutanan Kalimantan Timur perlu mengacu pada Renstra KLHK sebagai dasar penetapan strategi dan arah kebijakan kehutanan Kalimantan Timur.

III. 6. Penentuan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan kehutanan di Kalimantan Timur memberikan gambaran kondisi daerah yang membutuhkan perhatian dan upaya penanganan. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi bagian penting dalam perumusan isu strategis pembangunan kehutanan. Permasalahan pembangunan kehutanan, serta kebijakan nasional dan provinsi, menjadi dasar untuk perumusan isu strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode tahun 2024-2026.

Isu strategis pembangunan sektor Kehutanan di Kalimantan Timur tahun 2024-2026 meliputi:

III. 6. 1. KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH

Pemanfaatan hutan masih bertumpu pada produk hasil hutan kayu, yang saat ini mulai mengalami stagnan, seiring dengan semakin tumbuhnya produk pengganti kayu. Perubahan peraturan dan kebijakan kehutanan nasional, diharapkan dapat mendorong diversifikasi produk hasil hutan, terutama pengembangan pemanfaatan hutan untuk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Prioritas utama yang perlu dilakukan adalah mempertahankan dan tetap meningkatkan produktivitas dan produksi hasil hutan kayu, sembari memastikan ketercukupan bahan baku untuk Industri Usaha Pengolahan Hasil Hutan, serta mendorong produk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

III. 6. 2. PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN UPAYA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DARI SEKTOR KEHUTANAN

Isu perubahan iklim dan perkembangan upaya mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, dapat menjadi peluang baru dalam meningkatkan upaya penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan. Terbitnya kebijakan Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink tahun 2030 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai upaya pencapaian target Kontribusi Nasional yang Ditentukan tahun (*Nationally Determined Contribution/NDC*) tahun 2030 dan percepatan *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR)* 2050, merupakan ruang bagi sektor Kehutanan Kalimantan Timur untuk berkontribusi dalam upaya tersebut.

Provinsi Kalimantan Timur yang sedang melaksanakan Program Penurunan Emisi GRK Berbasis Hutan dan Lahan (*East Kalimantan Jurisdictional Emission Reduction Program/EK-JERP*) melalui skema *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-Carbon Fund)* yang berlangsung hingga 2024, menjadi potensi diperolehnya insentif finansial karbon untuk mendukung pembangunan sektor Kehutanan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran dalam Renstra didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis bidang kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 adalah:

1. Tujuan 1. Mewujudkan diversifikasi ekonomi Sub Sektor Kehutanan
Tujuan ini mengacu pada Sasaran 5 Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi dalam Tujuan 2 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Tujuan ini menargetkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Kehutanan sebesar 0,67% di tahun 2026.
 - a) Sasaran 1.1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan. Sasaran 1 ini menargetkan meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan sebesar 8,95 triliun Rupiah di tahun 2026.
2. Tujuan 2. Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan
Tujuan ini mengacu pada Sasaran 9 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dalam Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Tujuan ini menargetkan Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business as Usual (BaU) sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan sebesar 25,49% di tahun 2026.
 - a) Sasaran 2.1. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan. Sasaran ini menargetkan penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU) sebesar 1,74 juta ton CO₂e di tahun 2026.
3. Tujuan 3. Mewujudkan Birokrasi pemerintahan yang Akuntabel dan memiliki Pelayanan Publik Berkualitas
Tujuan ini mengacu pada Sasaran 11 Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang didukung ASN BerAKHLAK dalam Tujuan 4 Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berorientasi Pelayanan Publik RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Tujuan ini menargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah dengan nilai indeks 86 di tahun 2026,

dan menargetkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah senilai A (80,01) pada Tahun 2026.

- a) Sasaran 3. 1. Peningkatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sasaran ini menargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dengan nilai indeks 86 di tahun 2026, dan menargetkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah senilai A (80,01) pada Tahun 2026.

Tabel IV.1. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
Tujuan 1. Mewujudkan diversifikasi ekonomi Sub Sektor Kehutanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi sub Sektor Kehutanan	%	-8,097	0,45	0,57	0,67	0,67
Sasaran 1.1. Meningkatkan PDRB Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	triliun rupiah	8,94	8,84	8,89	8,95	8,95
Tujuan 2. Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business as Usual (BaU) sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	%	81,28	23,32	24,40	25,49	25,49
Sasaran 2.1. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU)	juta ton CO _{2e}	5,54	1,59	1,67	1,74	1,74
Tujuan 3. Mewujudkan Birokrasi pemerintahan yang Akuntabel dan memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks	84,41	85	85,5	86	86
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	BB (78,10)	BB (78,50)	BB (79,30)	A (80,01)	A (80,01)
Sasaran 3.1. Peningkatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	83	85	85,5	86	86
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	BB (71,92) (2021)	BB (78,50)	BB (79,30)	A (80,01)	A (80,01)

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan. Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, dan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan menjadi satu rangkaian dari perumusan suatu perencanaan yang lebih komprehensif yang dapat digunakan sebagai tuntunan atau rujukan bagi Dinas Kehutanan Kalimantan Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel V.1. Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan / Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1. Mewujudkan diversifikasi ekonomi SubSektor Kehutanan		
Sasaran 1.1. Meningkatkan PDRB Sub Sektor Kehutanan	Strategi 1.1. Meningkatkan produksi hasil hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu	Arah Kebijakan 1.1. Optimalisasi Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
		Arah Kebijakan 1.2. Pembinaan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun
		Arah Kebijakan 1.3 Peningkatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Tujuan 2. Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan		
Sasaran 2.1. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Strategi 2.1. Meningkatkan Pengelolaan berkelanjutan	Arah Kebijakan 2.1. Penyusunan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi yang baik.
		Arah Kebijakan 2.2. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) yang baik.
	Strategi 2.2. Meningkatkan Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap Luas lahan yang dapat direhabilitasi.	Arah Kebijakan 2.3. Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan.
	Strategi 2.3. Meningkatkan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui kerja sama para pihak	Arah Kebijakan 2.4. Peningkatan kualitas dan kuantitas bibit tanaman melalui sertifikasi sumber benih.
		Arah Kebijakan 2.5. Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dan pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu multi pihak.
	Strategi 2.4. Mengurangi Laju Deforestasi melalui perlindungan dan pengamanan kawasan	Arah Kebijakan 2.6. Optimalisasi kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat

Tujuan / Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<p>hutan</p> <p>Strategi Meningkatkan Pengelolaan Bernilai Penting (KBEP) Kawasan Ekosistem</p> <p>Strategi 2.6. Pemberian Akses Legal Pengelolaan Hutan kepada Masyarakat di dalam dan sekitar Hutan serta Peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat berbasis Perhutanan Sosial</p>	<p>2.5. Arah Kebijakan 2.7. Meningkatkan upaya pengelolaan Tahura Provinsi</p> <p>Arah Kebijakan 2.8. Meningkatkan upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi</p> <p>Arah Kebijakan 2.9. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan multi-pihak kawasan bernilai ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.</p> <p>Arah Kebijakan 2.10. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas penyuluh kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</p>
Tujuan 3. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas		
Sasaran 3. 1. Peningkatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Strategi 3.1. Peningkatan efisiensi dan kualitas ketatalaksanaan serta Penerapan reformasi birokrasi dan Core value ASN Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK)	Arah Kebijakan 3.1. Meningkatkan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

VI. 1. Rencana Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur umumnya telah mempertimbangkan program prioritas yang dirumuskan dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024–2026, serta tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada bab-bab terdahulu. Program dan kegiatan Dinas Kehutanan Kaltim ini bersumber pendanaan dari Pemerintah Daerah.

VI. 1. 1. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

Program ini memiliki 7 kegiatan dan 39 sub kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi pada 3 Bidang (Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan) dan 20 UPTD yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dengan indikator kinerja adalah produksi hasil hutan kayu dan produksi hasil hutan bukan kayu, penurunan emisi GRK sektor Kehutanan, persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi, dan penurunan kerusakan kawasan hutan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
3. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
4. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <math><6000\text{ m}^3/\text{tahun}</math>
7. Perbenihan Tanaman Hutan

VI. 1. 2. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 18 sub-kegiatan, yang menjadi tugas dan fungsi pada bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UPTD Tahura Bukit Soeharto dan 19 UPTD

KPH yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Indikator dari program ini adalah Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola, jumlah tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam Lampiran CITES, dan Penurunan Emisi GRK berbasis hutan di KBEP dan Konservasi Provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
2. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi
3. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

VI. 1. 3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan, dan 20 UPTD yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Indikator dari program ini adalah jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya, luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat, dan emisi GRK berbasis hutan dari perhutanan sosial. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

VI. 1. 4. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 6 sub-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan 20 UPTD yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Indikator dari program ini adalah luas DAS dan sub DAS yang dikelola dan emisi GRK berbasis hutan di wilayah DAS yang dikelola. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

VI. 1. 5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan sub-Bagian Tata Usaha pada 20 UPTD yang berada

di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Indikator dari program ini adalah Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

VI. 2. Pendanaan

Rencana pendanaan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 hanya mencakup program dan kegiatan yang didanai oleh dana pemerintah. baik bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK). maupun Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan - Dana Reboisasi (DBH SDA DR).

Tabel VI.1. Rencana Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		3.28	Dinas Kehutanan					586.992.590.000		535.400.847.000		577.001.767.000				
Tujuan 1. Mewujudkan diversifikasi ekonomi Sub Sektor Kehutanan	Sasaran 1.1 Meningkatkan PDRB Sub Sektor Kehutanan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
			1). Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.471.286,16	4.420.000	25.324.422.000	4.450.000	25.324.422.000	4.475.000	27.324.422.000	4.475.000		Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur	
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	826,05	850	5.558.990.000	900	5.558.990.000	950	5.558.990.000	950				
		3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	hektare	2.923.546,22	5.153.407,17	22.237.542.000	5.153.407,17	22.237.542.000	5.153.407,17	24.237.542.000	5.153.407,17			
		3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	dokumen	20	26	4.047.281.000	26	4.047.281.000	26	4.047.281.000	26			
		3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	dokumen	12	9	1.656.693.500	9	1.656.693.500	9	1.656.693.500	27			
		3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPB Di Kawasan Hutan Produksi	dokumen	90	90	13.081.771.500	90	13.081.771.500	91	15.081.771.500	91			
		3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPB Di Kawasan Hutan Lindung	dokumen	4	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	12			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	dokumen	50	50	2.851.796.000	50	2.851.796.000	50	2.851.796.000	50		
		3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	hektare	5153407,17	5.153.407,17	4.784.400.000	5.153.407,17	4.784.400.000	5.153.407,17	4.784.400.000	5.153.407,17		
		3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	unit manajemen	2	9	4.784.400.000	9	4.784.400.000	9	4.784.400.000	9		
		3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil produksi izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	meter kubik	21.000	21.000	3.861.470.000	21.000	3.861.470.000	21.000	3.861.470.000	21.000		
		3.28.03.1.07.01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	unit manajemen	48	774.590.000	48	774.590.000	48	774.590.000	48	48		
		3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	dokumen	51	1.414.920.000	51	1.414.920.000	51	1.414.920.000	51	51		
		3.28.03.1.07.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	unit manajemen	13	1.671.960.000	13	1.671.960.000	13	1.671.960.000	13	13		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik												
Tujuan 2. Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Sasaran 2.1 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47	0,47	89.670.958.000	0,71	92.830.132.000	0,95	102.670.958.000	0,95		
				2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	0,12	1,00	135.892.372.000	1,00	114.300.629.000	1,00	125.760.723.000	1,00		
				Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	dokumen	24	19	57.255.127.100	19	35.663.384.100	19	35.663.384.100	19		
		3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah rancang bangun tata hutan wilayah KPH yang disusun	dokumen	3	2	225.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	2		
		3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah unit KPHP/L yang telah dilakukan pembagian blok	unit	14	14	2.050.260.100	14	2.050.260.100	14	2.050.260.100	14		
		3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasional resor dan kantor resor KPH yang terbangun	unit	304	262	54.009.867.000	258	32.418.124.000	256	32.418.124.000	256		
		3.28.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	dokumen	7	10	970.000.000	10	970.000.000	10	970.000.000	10		
		3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan	Jumlah Dokumen	dokumen	7	20	10.031.256.150	20	10.031.256.150	20	10.031.256.150	20		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)											
		3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	33	29	10.031.256.150	29	10.031.256.150	29	10.031.256.150	29		
		3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	hektare	1.366	1.200	85.099.333.000	1.200	86.558.507.000	1.200	96.399.333.000	3.600		
		3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	dokumen	16	16	2.842.862.000	16	2.842.862.000	16	2.842.862.000	16		
		3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	hektare	941	1.200	67.706.550.500	1.200	69.165.724.500	1.200	79.006.550.500	3.600		
		3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	unit	100	103	2.000.000.000	103	2.000.000.000	103	2.000.000.000	103		
		3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	laporan	35	43	12.549.920.500	43	12.549.920.500	43	12.549.920.500	43		
		3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	hektare	10.402	7.929.179,13	68.605.988.750	7.929.179,13	68.605.988.750	7.929.179,13	80.066.082.750	7.929.179,13		
		3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli	hektare	10.385	938.660	2.318.473.000	938.660	2.318.473.000	938.660	2.318.473.000	938.660		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Pembatasan Kerusakan Hutan	Pengamanan Hutan				0							
		3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	hektare	1.555.516	3.061.189,54	4.588.098.000	3.061.189,54	4.588.098.000	3.061.189,54	4.588.098.000	3.061.189,54		
		3.28.03.1.05.03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	operasi	1	6	2.435.342.000	6	2.435.342.000	6	2.435.342.000	6		
		3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	dokumen	155	156	15.144.413.000	156	15.144.413.000	166	21.104.507.000	166		
		3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	laporan	361	354	44.119.662.750	354	44.119.662.750	355	49.619.662.750	355		
		3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	1.) Jumlah SK Pengada/Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah SK	27	20	4.571.625.000	20	6.271.625.000	20	6.271.625.000	20		
				2.) Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang terverifikasi	Sertifikat	19	10		10		10		10		
		3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran	unit usaha	27	23	2.307.422.000	26	4.007.422.000	26	4.007.422.000	20		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Benih dan Bibit Dalam Provinsi											
		3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	19	20	900.000.000	20	900.000.000	20	900.000.000	30		
		3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	laporan	57	80	1.364.203.000	80	1.364.203.000	80	1.364.203.000	75		
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA												
				Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	hektare	72.311,38	610.540,98	18.556.035.000	730.007,98	18.556.035.000	930.007,98	18.556.035.000	930.007,98		
		3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	hektare	64.814,98	64.814,98	11.813.505.000	64.814,98	11.813.505.000	64.814,98	11.813.505.000	64.814,98		
		3.28.04.1.01.02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	operasi	5	12	6.000.000.000	12	6.000.000.000	12	6.000.000.000	12		
		3.28.04.1.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	hektare	400	250	5.000.000.000	250	5.000.000.000	250	5.000.000.000	250		
		3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	desa	1	3	813.505.000	3	813.505.000	3	813.505.000	3		
		3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	spesies	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Kewenangan Daerah Provinsi												
		3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3		
		3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	hektare	7.496,4	545.726	6.642.530.000	665.193	6.642.530.000	865.193	6.642.530.000	865.193		
		3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	hektare	50	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50		
		3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	orang	450	570	2.327.191.200	570	2.327.191.200	570	2.327.191.200	570		
		3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	hektare	100.000	100.000	4.215.338.800	100.000	4.215.338.800	100.000	4.215.338.800	100.000		
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN												
				1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	hektare	48.258	20.000	35.367.302.000	20.000	35.367.302.000	20.000	41.167.302.000	60.000		
				2). Jumlah kelompok usaha	kelompok	10	20	35.296.415.000	20	35.296.415.000	20	45.796.415.000	60		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya											
		3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	20	90	70.663.717.000	90	70.663.717.000	110	86.963.717.000	290		
		3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	orang	102	266	21.262.346.500	266	21.262.346.500	308	26.262.346.500	308		
		3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	76	168	14.034.068.500	168	14.034.068.500	183	19.534.068.500	183		
		3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	hektare	66346	60.000	35.367.302.000	60.000	35.367.302.000	60.000	41.167.302.000	60.000		
		3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)												
				Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	hektare	258.130,31	10.104	4.289.275.000	196.336	4.289.275.000	358.190	4.289.275.000	358.190		
		3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	DAS	1	1	4.289.275.000	1	4.289.275.000	1	4.289.275.000	1		
		3.28.06.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1		
		3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	7	8	1.411.000.000	8	1.411.000.000	8	1.411.000.000	8		
		3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti	orang	6	300	1.928.275.000	300	1.928.275.000	300	1.928.275.000	300		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				0									
		3.28.06.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah lembaga yang dibentuk dan dikembangkan dalam forum pengelolaan DAS	Laporan	4	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1				
Tujuan 3. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Sasaran 3.1 Peningkatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	81	191.764.977.000	83	158.605.803.000	85	160.605.803.000	85				
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	45.271.844.000	100	45.271.844.000	100	45.271.844.000	100				
		3.28.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	%	100	100	2.813.200.000	100	2.813.200.000	100	2.813.200.000	100			
				3.28.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4		
				3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA SKPD	Dokumen	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2		
				3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	2	2	367.800.000	2	367.800.000	2	367.800.000	2		
				3.28.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	2		
				3.28.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	laporan	3	4	945.400.000	4	945.400.000	4	945.400.000	4		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Perangkat Daerah											
		3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	105.403.469.100	100	105.403.469.100	100	105.403.469.100	100		
		3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	615	550	99.911.996.000	550	99.911.996.000	550	99.911.996.000	550		
		3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	202	203	3.647.852.000	203	3.647.852.000	203	3.647.852.000	203		
		3.28.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	24	37	1.153.356.000	37	1.153.356.000	37	1.153.356.000	37		
		3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	4	48.832.700	4	48.832.700	4	48.832.700	4		
		3.28.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1		
		3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	35	66	341.432.400	66	341.432.400	66	341.432.400	66		
		3.28.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1		
		3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase Barang Milik Daerah pada	%	100	100	940.700.000	100	940.700.000	100	940.700.000	100		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Perangkat Daerah	SKPD yang telah ditatausahakan											
		3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	21	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2		
		3.28.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	21	4	6.500.000	4	6.500.000	4	6.500.000	4		
		3.28.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	3	7	25.200.000	7	25.200.000	7	25.200.000	7		
		3.28.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	13	670.000.000	13	670.000.000	13	670.000.000	13		
		3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	34	224.000.000	34	224.000.000	34	224.000.000	34		
		3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1		
		3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	5.120.196.000	100	5.120.196.000	100	5.120.196.000	100		
		3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	paket	713	254	2.511.693.000	254	2.511.693.000	254	2.511.693.000	254		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Kelengkapan											
		3.28.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1		
		3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	10	32	245.280.000	32	245.280.000	32	245.280.000	32		
		3.28.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	2	2	302.466.000	2	302.466.000	2	302.466.000	2		
		3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	68	363	1.890.000.000	363	1.890.000.000	363	1.890.000.000	363		
		3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	10	29	70.757.000	29	70.757.000	29	70.757.000	29		
		3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	21.475.816.000	100	21.475.816.000	100	21.475.816.000			
		3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	158	61	240.819.000	61	240.819.000	61	240.819.000	61		
		3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	184	164	4.843.968.000	164	4.843.968.000	164	4.843.968.000	164		
		3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	139	98	717.781.000	98	717.781.000	98	717.781.000	98		
		3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	76	53	60.000.000	53	60.000.000	53	60.000.000	53		
		3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	82	69	529.214.000	69	529.214.000	69	529.214.000	69		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	48	86	8.243.000	86	8.243.000	86	8.243.000	86		
		3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	465	364	14.347.218.000	364	14.347.218.000	364	14.347.218.000	364		
		3.28.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	1	202.611.000	1	202.611.000	1	202.611.000	1		
		3.28.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	3	6	525.962.000	6	525.962.000	6	525.962.000	6		
		3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	%	100	100	58.227.441.700	100	27.607.467.700	100	29.419.667.700	100		
		3.28.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	2	1	494.890.000	1	494.890.000	1	494.890.000	1		
		3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	166	45	860.378.400	45	860.378.400	45	860.378.400	45		
		3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	803	397	47.828.451.000	200	17.208.477.000	214	19.020.677.000	214		
		3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	3	14	6.394.755.200	14	6.394.755.200	14	6.394.755.200	14		
		3.28.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	5	7	1.989.470.000	7	1.989.470.000	7	1.989.470.000	7		
		3.28.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	unit	8	5	659.497.100	5	659.497.100	5	659.497.100	5		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan											
		3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	23.796.028.000	100	23.796.028.000	100	23.796.028.000	100		
		3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	142	91	107.142.000	91	107.142.000	91	107.142.000	91		
		3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	242	208	4.054.264.000	208	4.054.264.000	208	4.054.264.000	208		
		3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	14	581.384.000	14	581.384.000	14	581.384.000	14		
		3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	242	205	19.053.238.000	205	19.053.238.000	205	19.053.238.000	205		
		3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik	%	100	100	19.259.970.200	100	16.720.770.200	100	16.908.570.200	100		
		3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	14	6	234.808.500	6	234.808.500	6	234.808.500	6		
		3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	579	699	8.956.206.880	699	6.417.006.880	699	6.604.806.880	699		

VI-71

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3.28.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2		
		3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	252	945	1.592.634.000	945	1.592.634.000	945	1.592.634.000	945		
		3.28.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara	Unit	21	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1		
		3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	14	14	4.921.696.520	14	4.921.696.520	14	4.921.696.520	14		
		3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	25	2.450.128.800	25	2.450.128.800	25	2.450.128.800	25		
		3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	unit	3	3	1.085.495.500	3	1.085.495.500	3	1.085.495.500	3		
			Jumlah					586.992.590.000		535.400.847.000		577.001.767.000			

Rincian anggaran untuk setiap unit, bidang dan UPTD pada lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dapat dilihat pada bagian lampiran.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**VII. 1. Indikator capaian**

Indikator capaian digunakan untuk memudahkan proses penilaian terhadap keberhasilan pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator dirumuskan untuk setiap program dan kegiatan diupayakan mudah untuk diukur sehingga bersifat kuantitatif. Indikator disusun dengan mempertimbangkan prestasi pencapaian yang telah berhasil dilaksanakan oleh Bidang/UPTD di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel VII.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	Target		
				2024	2025	2026
Tujuan 1. Mewujudkan diversifikasi ekonomi Sub Sektor Kehutanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi sub Sektor Kehutanan	%	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan : 1. $PDRB_t$: Nilai PDRB Tahun Sekarang (harga konstan) 2. $PDRB_{t-1}$: Nilai PDRB Tahun Sebelumnya (harga konstan)</p>	0,45	0,57	0,67
Sasaran 1.1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	triliun rupiah	Produksi Hasil Hutan Kayu X Harga Kayu Berlaku	8,84	8,89	8,95
Tujuan 2. Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business as Usual (BaU) sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	%	$\frac{AER_b - ER_{tr}}{ER_b} \times 100\%$ <p>Keterangan : ER= Penurunan emisi (%) AER_b: Rerata emisi GRK pada periode baseline (2006-2020) (tonCO₂e) ER_tr = Emisi GRK pada tahun target (tonCO₂e)</p>	23,32	24,40	25,49
Sasaran 2.1. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU)	juta ton CO ₂ e	$\text{Baseline Emisi} - \text{Emisi GRK}_{(LUCt)}$ <p>Keterangan : LUC= Land Use Change/Perubahan Tutupan Hutan dan Lahan Baseline= Tahun referensi, mengikuti tahun referensi 2nd FRL Indonesia, yaitu dari tahun 2006-2020</p>	1,59	1,67	1,74

Tabel VII.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
IKK Outcome						
1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal}}{\text{Jumlah Total Usulan KTH yang teregistrasi}} \times 100\%$	75,00	75,75	78,78	78,78
2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	$\frac{\text{Jumlah Hutan yang Rusak}}{\text{Jumlah Hutan Keseluruhan}} \times 100\%$	1%	1%	1%	1%
3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	$\frac{\text{Luas Lahan Kritis di Provinsi yang di Rehabilitasi (Ha)}}{\text{Luas Lahan Kritis di Provinsi (Ha)}} \times 100\%$	89,00	93,07	97,14	97,14
IKK Output						
1. Dokumen penataan hutan wilayah KPH	dokumen	Dokumen Penataan Hutan KPH yang dibuat dalam 1 Tahun	19	19	19	19
2. Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	dokumen	Dokumen RPHJP dan RPHJPD yang Disahkan dalam 1 Tahun	19	19	19	19
3. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	dokumen	Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan yang dibuat dalam 1 Tahun	20	20	20	20

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
4. Tersusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	dokumen	Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 Provinsi yang dibuat dalam 1 Tahun	1	1	1	3
5. Luas lahan kritis yang direhabilitasi	hektare	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi dalam 1 Tahun	1.200	1.200	1.200	3.600
6. Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	hektare	Luas Kebakaran Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam 1 Tahun	300	300	300	300
7. Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	hektare	Luas Gangguan Kawasan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) dalam 1 Tahun	10.200	10.200	10.200	10.200
8. Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m ³ per tahun yang aktif	meter kubik (m ³)	Jumlah Produksi hasil izin usaha industri primer Hasil Hutan Kayu dalam 1 Tahun	21.000	22.000	23.000	66.000
9. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	desa	Masyarakat Desa yang diberdayakan di Daerah Penyangga dalam 1 Tahun	6	6	6	18
10. Pemulihan ekosistem pada Tahura	hektare	Luas Ekosistem pada Tahura yang di Pulihkan dalam 1 Tahun	400	400	400	12.000
11. Menurunnya gangguan kawasan Tahura	hektare	Luas Gangguan Pada Kawasan Hutan Tahura yang di Amankan dalam 1 Tahun	64.814,98	64.814,98	64.814,98	64.814,98
12. Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	orang	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Tersedia dalam 1 Tahun	39	42	45	45
13. Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kegiatan Penyuluhan yang disediakan dalam 1 Tahun	145	145	145	145
14. jumlah KTH yang	kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan Pendidikan dan	17	17	17	51

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
diberikan pendidikan dan pelatihan		Pelatihan dalam 1 Tahun				
15. Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	kelompok	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha Kelompok Perhutanan Sosial yang Difasilitasi dalam 1 Tahun	20	20	20	60
16. Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	forum	Jumlah Forum Komunikasi DAS yang dibentuk dalam 1 Tahun	1	1	1	3

VII. 2. Target Kinerja

Tabel VII.3. Target Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							
	1). Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.471.286,16	4.420.000	4.445.000	4.475.000	4.475.000
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	826,05	850	900	950	950
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	hektare	2.923.546,22	5.153.407,17	5.153.407,17	5.153.407,17	5.153.407,17
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	dokumen	20	26	26	26	26
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	dokumen	12	9	9	9	27
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	dokumen	90	90	90	91	91

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	dokumen	4	4	4	4	12
Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	dokumen	50	50	50	50	50
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	hektare	5.153.407,17	5.153.407,17	5.153.407,17	5.153.407,17	5.153.407,17
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	unit manajemen	2	9	9	9	9
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	meter kubik	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha	unit manajemen	9	48	48	48	48

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
	Kecil dan Menengah						
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	dokumen	31	51	51	51	51
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	unit manajemen	15	13	13	13	13
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							
	1). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47	0,47	0,71	0,95	0,95

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
	2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	0,12	1,00	1,00	1,00	1,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	dokumen	24	19	19	19	19
Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah rancang bangun tata hutan wilayah KPH yang disusun	Dokumen	3	2	2	2	2
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	unit	14	14	14	14	14
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	unit	304	262	258	256	256
Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen	7	10	10	10	10

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	7	20	20	20	20
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	33	29	29	29	29
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	hektare	1.366	1.200	1.200	1.200	1.200
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	dokumen	16	16	16	16	16
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	hektare	941	1.200	1.200	1.200	3.600
Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	unit	100	103	103	103	103
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	laporan	35	43	43	43	43
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	hektare	10.402	7.929.179,13	7.929.179,13	7.929.179,13	7.929.179,13

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	hektare	10.385	938.660	938.660	938.660	938.660
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	hektare	1.555.516	3.061.189,54	3.061.189,54	3.061.189,54	3.061.189,54
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	operasi	1	6	6	6	6
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	dokumen	155	156	156	166	166
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	laporan	361	354	354	355	355
Perbenihan Tanaman Hutan	1.) Jumlah SK Pengada/Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	jumlah SK	27	20	20	20	20
	2.) Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang terverifikasi"	Sertifikat	19	10	10	10	10
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani)	unit usaha	27	23	26	26	26

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
	Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi						
Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	19	20	20	20	20
Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	laporan	57	80	80	80	80
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA							
	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	hektare	72.311,38	610.540,98	730.007,98	930.007,98	930.007,98
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	hektare	64.814,98	64.814,98	64.814,98	64.814,98	64.814,98
Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	operasi	5	12	12	12	12
Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	hektare	400	250	250	250	250

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	desa	1	3	3	3	3
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	spesies	2	2	2	2	2
Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	1	1	1	1	1
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	hektare	7.496,4	545.726	665.193	865.193	865.193
Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	hektare	50	50	50	50	50
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan	Jumlah Kelompok/Masyarakat	orang	450	570	570	570	570

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	yang Diberdayakan						
Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	hektare	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							
	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	hektare	48.258	20.000	20.000	20.000	60.000
	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	kelompok	10	20	20	20	60
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	20	90	90	110	290
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	102	266	266	308	308
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan	Kelompok	76	168	168	183	183

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
	Pendampingan Kelembagaan						
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	hektare	66.346	20.000	20.000	20.000	60.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)							
	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	hektare	258.130,31	10.104	196.336	358.190	358.190
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	DAS	1	1	1	1	1
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	1
Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	7	8	8	8	8
Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	6	300	300	300	300
Pengembangan kelembagaan	Jumlah lembaga yang dibentuk dan	laporan	4	1	1	1	1

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
pengelolaan DAS	dikembangkan dalam forum pengelolaan DAS						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							-
	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	81	83	85	85
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	4	4	4
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA SKPD	Dokumen	2	2	2	2	2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	2	2	2	2	2
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	laporan	2	2	2	2	2

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	4	4	4	4
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	615	550	550	550	550
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	202	203	203	203	203
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	24	37	37	37	37
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	4	4	4	4

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	35	66	66	66	66
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	1	1
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	%	100	100	100	100	100
Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	21	2	2	2	2

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	21	4	4	4	4
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	3	7	7	7	7
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	13	13	13	13
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	34	34	34	34
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1	1	1	1
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100	100	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	713	254	254	254	254

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	10	32	32	32	32
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	2	2	2	2	2
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	68	363	363	363	363
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	10	29	29	29	29
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi	%	100	100	100	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	158	61	61	61	61
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	184	164	164	164	164

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	139	98	98	98	98
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	76	53	53	53	53
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	82	69	69	69	69
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	48	86	86	86	86
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	465	364	364	364	366
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	1	1	1	1
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	3	6	6	6	6
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	%	100	100	100	100	100

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	2	1	1	1	1
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	166	45	45	45	45
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	803	397	200	214	214
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	3	14	14	14	14
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	5	7	7	7	7
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	8	5	5	5	5
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	142	91	91	91	91

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	242	208	208	208	208
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	14	14	14	14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	242	205	205	205	205
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik	%	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	14	6	6	6	6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	579	699	699	699	699
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	2	2	2	2	2

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	712	945	945	945	945
Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara	Unit	21	1	1	1	1
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	14	14	14	14	14
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	25	25	25	25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	unit	3	3	3	3	3

BAB VIII. PENUTUP

Pembangunan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun ke depan sampai dengan terpilihnya Gubernur Kalimantan Timur sebagai hasil dari pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, dimuat dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada periode tersebut menjadi penentu pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur yang akan berakhir pada tahun 2025. Untuk itu, perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan yang dapat mengarahkan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sehingga diharapkan target-target pembangunan sektor Kehutanan dapat tercapai sesuai rencana.

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan kaidah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan sektor Kehutanan dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi dengan KLHK dan UPT KLHK, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah daerah sekitar ,terutama badan otorita IKN, serta masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan mitra pembangunan lainnya.
2. Renstra Dishut Kaltim menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Renja Dishut Kaltim) tahun 2024, 2025 dan 2026.
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melakukan evaluasi hasil terhadap Renstra Dishut Kaltim dengan menggunakan evaluasi hasil Renja Dishut Kaltim secara periodik.

4. Renstra Dishut Kaltim menjadi salah satu tolok ukur kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Samarinda, April 2023
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur

H. Joko Istanto, S.P., M.Si.
NIP. 19750807 200003 1 003

BAB IX. LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Pendanaan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	156.646.092.580,00	131.830.004.280,00	133.212.947.140,00
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	2.813.200.000	2.813.200.000	2.813.200.000
3.28.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	4	4	4	500.000.000	500.000.000	500.000.000
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA SKPD	Dokumen	2	2	2	2	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	2	2	2	2	367.800.000	367.800.000	367.800.000
3.28.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	2	2	700.000.000	700.000.000	700.000.000
3.28.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	4	945.400.000	945.400.000	945.400.000
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	101.459.506.800,00	101.459.506.800,00	101.459.506.800,00
3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	12	550	550	550	99.911.996.000	99.911.996.000	99.911.996.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	20	20	20	743.332.000	743.332.000	743.332.000
3.28.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	24	1	1	1	350.640.000	350.640.000	350.640.000
3.28.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	1	1	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	4	4	4	153.538.800	153.538.800	153.538.800
3.28.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	520.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2	2	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.28.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.28.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	960.916.000,00	960.916.000,00	960.916.000,00
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	147	5	5	5	511.693.000,00	511.693.000,00	511.693.000,00
3.28.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.28.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	2	2	2	302.466.000,00	302.466.000,00	302.466.000,00
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	12	12	12	46.757.000,00	46.757.000,00	46.757.000,00
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	4.089.935.000	4.089.935.000	4.089.935.000
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	12	12	12	56.819.000,00	56.819.000,00	56.819.000,00
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	487.968.000,00	487.968.000,00	487.968.000,00
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	2	2	2	140.281.000,00	140.281.000,00	140.281.000,00
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	43.606	12	12	12	163.714.000,00	163.714.000,00	163.714.000,00
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	Dokumen	12	12	12	12	2.643.000,00	2.643.000,00	2.643.000,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
		Disediakan								
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	208	12	12	12	2.558.733.240,00	2.558.733.240,00	2.558.733.240,00
3.28.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1	1	202.611.000,00	202.611.000,00	202.611.000,00
3.28.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	6	6	6	525.962.000,00	525.962.000,00	525.962.000,00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Disediakan	%	100%	100%	100%	100%	40.365.851.000,00	15.670.677.000,00	17.044.677.000,00
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	73	50	50	50	40.365.851.000,00	15.670.677.000,00	17.044.677.000,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	4.541.892.640,00	4.541.892.640,00	4.541.892.640,00
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	16.956.400,00	16.956.400,00	16.956.400,00
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	1.227.077.600,00	1.227.077.600,00	1.227.077.600,00
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	236.028.000,00	236.028.000,00	236.028.000,00
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	3.061.830.640,00	3.061.830.640,00	3.061.830.640,00
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	1.845.994.900,00	1.725.080.600,00	1.734.023.460,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	6	6	234.808.500,00	234.808.500,00	234.808.500,00
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40	64	64	64	857.235.700,00	736.321.400,00	745.264.260,00
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	140	140	140	409.950.700,00	409.950.700,00	409.950.700,00
3.28.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara	Unit	1	1	1	1	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	4	4	4	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	10.074.172.000,00	10.074.172.000,00	10.474.172.000,00
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	14	5.153.407	5.153.407	5.153.407	7.453.542.000	7.453.542.000	7.853.542.000
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	9	4	4	4	1.242.281.000,00	1.242.281.000,00	1.242.281.000,00
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	2	2	2	2	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	3	2	2	2	1.859.465.000,00	1.859.465.000,00	2.259.465.000,00
3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen	50	50	50	50	2.851.796.000,00	2.851.796.000,00	2.851.796.000,00
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	M3	15	16.499	16.499	16.499	3.320.630.000,00	3.320.630.000,00	3.320.630.000,00
3.28.03.1.07.01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	9	48	48	48	774.590.000,00	774.590.000,00	774.590.000,00
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	24	28	28	28	874.080.000,00	874.080.000,00	874.080.000,00
3.28.03.1.07.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	15	13	13	13	1.671.960.000,00	1.671.960.000,00	1.671.960.000,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	43.191.282.911,00	45.495.456.911,00	54.843.819.691,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
		direhabilitasi								
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	19	19	19	19	518.000.000	518.000.000	518.000.000
3.28.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen	7	7	7	7	518.000.000	518.000.000	518.000.000
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	7	20	20	20	1.514.852.000	1.514.852.000	1.514.852.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	7	2	2	2	1.514.852.000	1.514.852.000	1.514.852.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	530	250	250	250	25.409.338.131,00	25.063.512.131,00	26.924.338.131,00
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	7	1	1	1	560.757.630,00	560.757.630,00	560.757.630,00
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	500	548	548	548	15.741.550.500,00	15.395.724.500,00	17.256.550.500,00
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit	100	100	100	100	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	23	20	20	20	7.507.030.001,00	7.507.030.001,00	7.507.030.001,00
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan	Luas Kerusakan	Hektar	8	7.929.179	7.929.179	7.929.179			

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
	Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Kawasan Hutan						11.727.467.780,00	12.127.467.780,00	19.615.004.560,00
3.28.03.1.05.03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Operasi	1	6	6	6	2.435.342.000,00	2.435.342.000,00	2.435.342.000,00
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	4	6	6	6	4.404.589.000,00	4.404.589.000,00	7.904.589.000,00
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	5	7	7	7	4.887.536.780,00	5.287.536.780,00	9.275.073.560,00
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	1.) Jumlah SK Pengada/Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar; 2.) Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang terverifikasi	1.) Jumlah SK; 2.) Sertifikat	96	101	105	105	4.021.625.000	6.271.625.000	6.271.625.000
3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha	20	22	26	26	1.757.422.000,00	4.007.422.000,00	4.007.422.000,00
3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	19	20	20	20	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan	57	80	80	80	1.364.203.000,00	1.364.203.000,00	1.364.203.000,00
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Hektar	72.312	610.540,98 Hektar	730.007,98 Hektar	930.007,98 Hektar	5.254.868.800,00	5.254.868.800,00	5.254.868.800,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	Hektar	7.496	545.675	665.142	865.142	5.826.687.000	5.826.687.000	5.826.687.000
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	21	450	450	450	1.739.530.000,00	1.739.530.000,00	1.739.530.000,00
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Hektar	100.000	100.000	100.000	100.000	3.515.338.800,00	3.515.338.800,00	3.515.338.800,00
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	34.924.564.841	34.924.564.841	38.974.564.841
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	15	17	17	17	34.658.087.341,00	34.658.087.341,00	38.708.087.341,00
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	69	124	124	136	18.157.078.691,00	18.157.078.691,00	19.207.078.691,00
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	22	90	90	90	3.650.760.000,00	3.650.760.000,00	5.650.760.000,00
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	53.820	20.000	20.000	20.000	12.850.248.650,00	12.850.248.650,00	13.850.248.650,00
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Hektar	258.130	10.104	196.336	358.190	3.284.995.000,00	3.284.995.000,00	3.284.995.000,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	DAS	17	1	1	1	3.284.995.000	3.284.995.000	3.284.995.000
3.28.06.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	6	6	6	6	406.720.000,00	406.720.000,00	406.720.000,00
3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	6	300	300	300	1.928.275.000,00	1.928.275.000,00	1.928.275.000,00
3.28.06.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Laporan	1	1	1	1	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00

Lampiran 2. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Balikpapan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHL Balikpapan							19.164.500.104,00	14.119.776.294,00	14.766.481.614,00
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.717.636.187,00	3.173.521.902,00	3.213.764.759,00
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	179.820.000,00	179.820.000,00	179.820.000,00
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	148.100.000,00	148.100.000,00	148.100.000,00
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	12	12	12	31.720.000,00	31.720.000,00	31.720.000,00
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	205.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	88	200	200	200	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	15	15	15	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	902.924.238,00	902.924.238,00	902.924.238,00
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	8	8	8	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	12	50	50	50	242.000.000,00	242.000.000,00	242.000.000,00

		Kantor yang Disediakan								
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	20	20	20	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	3	3	3	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238,00	589.424.238,00	589.424.238,00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	%	100%	100%	100%	100%	530.000.000,00	106.800.000,00	138.100.000,00
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	40	13	14	530.000.000,00	106.800.000,00	138.100.000,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	1.159.191.260,00	1.159.191.260,00	1.159.191.260,00
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1	1	1	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	167.324.700,00	167.324.700,00	167.324.700,00
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1	1	1	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1	1	1	908.116.560,00	908.116.560,00	908.116.560,00
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	740.700.689,00	619.786.404,00	628.729.261,00
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	90	41	41	41	412.350.689,00	291.436.404,00	300.379.261,00
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	50	50	50	38.350.000,00	38.350.000,00	38.350.000,00
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	1	3	3	3	290.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi								
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407	5.153.407	5.153.407	5.153.407	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen	1	1	1	1	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	13.442.583.917,00	8.941.974.392,00	9.048.436.855,00
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	7.265.583.917	3.419.974.392	2.756.436.855
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	1	1	1	1	425.956.000	425.956.000	425.956.000
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	3	20	20	20	6.839.627.917	2.994.018.392	2.330.480.855
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	3	1	1	1	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan	Hektar	50	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000

	Negara	negara yang ditanam dan dipelihara								
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179	7.497.170	7.497.170	7.497.170	2.592.000.000	2.392.000.000	2.742.000.000
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	12	12	12	250.000.000	250.000.000	250.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	1	12	12	12	1.842.000.000	1.642.000.000	1.992.000.000
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	1.) Jumlah SK Pengada/Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar; 2.) Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang terverifikasi	1.) Jumlah SK; 2.) Sertifikat	1	105	-	-	550.000.000	-	-
3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha	1	1	-	-	550.000.000	-	-
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Hektar	72.312	610.540,98 Hektar	730.007,98 Hektar	930.007,98 Hektar	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On Internationl Trade In Endangered Species) untuk	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	2	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000

	Kewenangan Daerah Provinsi									
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	1	1	1	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	600.000.000	600.000.000	1.100.000.000
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	2	2	2	600.000.000	600.000.000	1.100.000.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	2	2	2	2	400.000.000	400.000.000	600.000.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	1.500	1.500	1.500	1.500	200.000.000	200.000.000	500.000.000
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Hektar	258.130	10.104	196.336	358.190	1.004.280.000	1.004.280.000	1.004.280.000
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	DAS	1	1	1	1	1.004.280.000	1.004.280.000	1.004.280.000
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	4	4	4	4	1.004.280.000	1.004.280.000	1.004.280.000

Lampiran 3. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Rook						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHL Batu Rook							13.843.532.697	13.805.231.817	14.907.220.958
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	2.885.068.527	2.764.154.242	2.773.097.099
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	154.940.000	154.940.000	154.940.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	139.940.000,	139.940.000	139.940.000
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	12	12	12	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4	4	4	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	235.000.000	235.000.000	235.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	48	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	2	2	2	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Orang	23	2	2	2	30.000.000	30.000.000	30.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Rook						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHL Batu Rook							13.843.532.697	13.805.231.817	14.907.220.958
		Pendidikan dan Pelatihan								
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	902.924.238	902.924.238	902.924.238
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	40	40	40	589.424.238	589.424.238	589.424.238
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didirikan	%	100%	100%	100%	100%	152.600.000	152.600.000	152.600.000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	23	2	2	2	110.000.000	110.000.000	110.000.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	22	1	1	1	42.600.000	42.600.000	42.600.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	841.435.200	841.435.200	841.435.200
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	171.810.800	171.810.800	171.810.800
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	669.624.400	669.624.400	669.624.400
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	570.169.089	449.254.804	458.197.661

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Rook						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHL Batu Rook							13.843.532.697	13.805.231.817	14.907.220.958
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	18	18	18	280.499.089	159.584.804	168.527.661
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	28	28	28	59.670.000	59.670.000	59.670.000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	230.000.000	230.000.000	230.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	604.500.000	604.500.000	604.500.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	25	5.153.407	5.153.407	5.153.407	604.500.000	604.500.000	604.500.000
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	2	3	3	3	304.500.000	304.500.000	304.500.000
3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen	1	3	3	3	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	8.910.316.983	8.992.930.388	9.385.976.672
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	2	1	1	1	2.023.441.950	2.011.055.355	1.984.101.672
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah	Unit	2	2	2	2	600.000.000	600.000.000	600.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Rook						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHL Batu Rook							13.843.532.697	13.805.231.817	14.907.220.958
		Dilakukan Pembagian Blok								
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	2	30	30	30	1.423.441.950	1.411.055.355	1.384.101.672
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	675.000.000	675.000.000	675.000.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	2	2	2	675.000.000	675.000.000	675.000.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	15	50	50	50	3.612.875.000	3.707.875.000	4.127.875.000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	1	1	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1	1	1	1	727.875.000	727.875.000	727.875.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	5	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.599.000.033	2.599.000.033	2.599.000.000
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	5	1.000	1.000	1.000	299.000.000	299.000.000	299.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	6	6	6	6	500.000.033	500.000.033	500.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam	Laporan	10	10	10	10	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Rook						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHL Batu Rook							13.843.532.697	13.805.231.817	14.907.220.958
	Kebakaran Hutan dan Lahan	Satu Tahun								
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.443.647.187	1.443.647.187	2.143.647.187
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	1	3	3	3	1.443.647.187	1.443.647.187	2.143.647.187
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	2	2	2	6	399.999.809	399.999.809	649.999.809
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	4	4	4	473.647.800	473.647.800	723.647.800
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	500	1.000	1.000	1.000	569.999.578	569.999.578	769.999.578

Lampiran 4. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Ayau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Batu Ayau							18.719.199.976	15.069.910.970	16.671.202.685
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	4.324.261.827	3.780.147.542	3.820.390.399
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	200.606.000	200.606.000	200.606.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	136.100.000	136.100.000	136.100.000
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2	2	2	8.832.700	8.832.700	8.832.700
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	10	10	10	55.673.300	55.673.300	55.673.300
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	54.700.000	54.700.000	54.700.000
3.28.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	3	3	3	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.28.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	3	7	7	7	25.200.000	25.200.000	25.200.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	8	8	8	28.000.000	28.000.000	28.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Ayau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Batu Ayau							18.719.199.976	15.069.910.970	16.671.202.685
		pada SKPD								
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	312.280.000	312.280.000	312.280.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	33	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5	14	14	14	95.280.000	95.280.000	95.280.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	10	10	10	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	10	10	10	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	902.924.238	902.924.238	902.924.238
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1	1	1	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	7	7	7	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	3	3	3	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	1	1	1	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	42	40	40	40	589.424.238	589.424.238	589.424.238
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	%	100%	100%	100%	100%	753.624.400	330.424.400	361.724.400

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Ayau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Batu Ayau							18.719.199.976	15.069.910.970	16.671.202.685
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	14	14	14	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	2	223.624.400	223.624.400	223.624.400
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	1.435.975.800	1.435.975.800	1.435.975.800
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan							
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	14.500.000	14.500.000	14.500.000
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	12	12	12	174.610.500	174.610.500	174.610.500
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3	3	3	221.198.500	221.198.500	221.198.500
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	832.198.300	832.198.300	832.198.300
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	23	23	23	253.598.589	132.684.304	141.627.161
3.28.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	2	2	2	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	85	85	85	113.500.000	113.500.000	113.500.000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	230.612.800	230.612.800	230.612.800

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Ayau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Batu Ayau							18.719.199.976	15.069.910.970	16.671.202.685
3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1	1	1	1	51.440.000	51.440.000	51.440.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	1.201.113.250	1.201.113.250	1.207.363.250
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	69.911	5.153.407	5.153.407	5.153.407	1.201.113.250	1.201.113.250	1.207.363.250
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	2	2	2	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen		2	2	2	194.196.000	194.196.000	194.196.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen		10	10	10	751.917.250	751.917.250	758.167.250
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	12.493.824.899	9.388.650.178	9.723.449.036
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	5.219.301.600	2.019.126.879	1.933.925.737
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	Dokumen	3	3	3	3	225.000.000	225.000.000	225.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Ayau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Batu Ayau							18.719.199.976	15.069.910.970	16.671.202.685
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	2	2	2	225.000.000	225.000.000	225.000.000	2
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	129	28	59	57	4.499.529.100	1.299.354.379	1.214.153.237
3.28.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen		2	2	2	222.000.000	222.000.000	222.000.000
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	4	1	1	1	354.946.300	354.946.300	354.946.300
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	1	1	1	354.946.300	354.946.300	354.946.300
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	100	50	50	50	4.282.420.999	4.377.420.999	4.797.420.999
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen		1	1	1	204.052.000	204.052.000	204.052.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	80	80	80	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	2	15	15	15	1.343.368.999	1.343.368.999	1.343.368.999
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	2	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.637.156.000	2.637.156.000	2.637.156.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Ayau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Batu Ayau							18.719.199.976	15.069.910.970	16.671.202.685
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	1.500	1.500	1.500	1.500	215.783.600	215.783.600	215.783.600
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	10	13	13	13	600.000.000	600.000.000	600.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	20	29	29	29	1.821.372.400	1.821.372.400	1.821.372.400
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	700.000.000	700.000.000	1.920.000.000
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	11	4	4	6	700.000.000	700.000.000	1.920.000.000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	11	8	8	12	200.000.000	200.000.000	300.000.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	8	6	6	8	300.000.000	300.000.000	720.000.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	5.000	2.000	2.000	2.000	200.000.000	200.000.000	900.000.000

Lampiran 5. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengkulu

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Bengkalon						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Bengkulu							13.989.878.773	13.576.582.014	15.054.092.619
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	4.301.778.387	3.757.664.102	3.797.906.959
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	171.280.300	171.280.300	171.280.300
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	4	4	4	145.700.000	145.700.000	145.700.000
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	4	4	4	25.580.300	25.580.300	25.580.300
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	205.000.000	205.000.000	205.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	3	3	3	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	58	58	58	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	864.424.238	864.424.238	864.424.238
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	4	7	7	7	242.000.000	242.000.000	242.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Bengalon						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Bengalon							13.989.878.773	13.576.582.014	15.054.092.619
		Kantor yang Disediakan								
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2	2	2	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	12	12	12	589.424.238	589.424.238	589.424.238
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	%	100%	100%	100%	100%	1.457.270.000	1.034.070.000	1.065.370.000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	4	4	4	66.000.000	66.000.000	66.000.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	16	6	8	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2	2	2	861.270.000	861.270.000	861.270.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	840.280.560	840.280.560	840.280.560
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	4	4	4	247.039.600	247.039.600	247.039.600
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	593.240.960	593.240.960	593.240.960
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	763.523.289	642.609.004	651.551.861
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	35	35	35	401.602.689	280.688.404	289.631.261
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	33	99	99	99	71.920.600	71.920.600	71.920.600

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Bengalon						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Bengalon							13.989.878.773	13.576.582.014	15.054.092.619
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	3	3	3	290.000.000	290.000.000	290.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	698.025.950	698.025.950	804.275.950
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	4	5.153.407	5.153.407	5.153.407	698.025.950	698.025.950	804.275.950
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	4	5	5	5	698.025.950	698.025.950	804.275.950
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	7.355.931.836	7.486.749.362	8.117.767.110
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1.308.678.736	1.544.496.262	1.505.514.010
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	1	4	4	4	1.308.678.736	1.544.496.262	1.505.514.010
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	404.225.500	404.225.500	404.225.500
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	404.225.500	404.225.500	404.225.500

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Bengalon						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Bengalon							13.989.878.773	13.576.582.014	15.054.092.619
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	1.200	1.200	1.200	2.795.000.000	2.890.000.000	3.310.000.000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	1	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	405	405	405	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	6	7.497.170	7.497.170	7.497.170	2.848.027.600	2.648.027.600	2.898.027.600
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	10.000	641.969	641.969	641.969	400.000.400	400.000.400	400.000.400
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	2	12	12	12	450.000.000	450.000.000	450.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	6	6	6	7	1.998.027.200	1.798.027.200	2.048.027.200
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.634.142.600	1.634.142.600	2.334.142.600
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	2	4	4	5	1.634.142.600	1.634.142.600	2.334.142.600
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	4	3	3	6	200.000.000	200.000.000	400.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Bengalon						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Bengalon							13.989.878.773	13.576.582.014	15.054.092.619
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	4	5	5	5	784.142.600	784.142.600	784.142.600
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	500	1.000	1.000	1.000	650.000.000	650.000.000	1.150.000.000

Lampiran 6. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Barat						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Barat							17.930.321.346	15.863.690.559	17.007.247.104
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.939.953.029	3.395.838.744	3.436.081.601
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	141.620.000	141.620.000	141.620.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	141.620.000	141.620.000	141.620.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	205.000.000	205.000.000	205.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	30	3	3	3	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	10	10	10	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	864.424.238	864.424.238	864.424.238
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	12	12	12	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238	589.424.238	589.424.238

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Barat						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Barat							17.930.321.346	15.863.690.559	17.007.247.104
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100%	100%	100%	100%	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	25	6	8	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	950.169.702	950.169.702	950.169.702
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	9.008.800	9.008.800	9.008.800
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	104.072.000	104.072.000	104.072.000
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	837.088.902	837.088.902	837.088.902
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	1.248.739.089	1.127.824.804	1.136.767.661
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	30	30	30	401.602.689	280.688.404	289.631.261
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	12	12	89.460.000	89.460.000	89.460.000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	3	3	323.620.900	323.620.900	323.620.900
3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1	1	1	1	434.055.500	434.055.500	434.055.500
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	698.025.950	698.025.950	804.275.950
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan	Hektar	5.153.407	5.153.407	5.153.407	5.153.407	698.025.950	698.025.950	804.275.950

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Barat						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Barat							17.930.321.346	15.863.690.559	17.007.247.104
	dan Hutan Lindung	Hutan								
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	12	22	22	22	698.025.950	698.025.950	804.275.950
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	11.106.373.367	9.583.856.865	9.880.920.553
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	3.477.348.600	1.859.832.098	1.736.895.786
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	1	2	2	2	3.437.348.600	1.819.832.098	1.696.895.786
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	50	50	50	3.890.234.000	3.985.234.000	4.405.234.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	67	67	67	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	4	2	2	2	1.155.234.000	1.155.234.000	1.155.234.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	3	7.929.179	7.929.179	7.929.179	3.778.790.767	3.778.790.767	3.778.790.767
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar		50	50	50	800.000.000	800.000.000	800.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat	Dokumen	11	12	12	12	1.122.960.967	1.122.960.967	1.122.960.967

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Barat						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Barat							17.930.321.346	15.863.690.559	17.007.247.104
	Hutan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	11	12	12	12	1.855.829.800	1.855.829.800	1.855.829.800
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	2.185.969.000	2.185.969.000	2.885.969.000
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	2	3	3	10	2.185.969.000	2.185.969.000	2.885.969.000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	3	10	10	10	201.499.000	201.499.000	351.499.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	3	3	11	843.509.000	843.509.000	893.509.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	3	30	30	30	1.140.961.000	1.140.961.000	1.640.961.000

Lampiran 7. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Pantai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Pantai							14.993.107.644	14.784.516.049	16.380.788.656
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.447.287.107	2.903.172.822	2.943.415.679
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	131.300.000	131.300.000	131.300.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	131.300.000	131.300.000	131.300.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	205.000.000	205.000.000	205.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	34	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	15	15	15	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	639.924.238	639.924.238	639.924.238
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5	5	5	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	12	12	12	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238	589.424.238	589.424.238
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didirikan	%	100%	100%	100%	100%	1.026.000.000	602.800.000	634.100.000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	6	2	2	2	66.000.000	66.000.000	66.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Pantai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Pantai							14.993.107.644	14.784.516.049	16.380.788.656
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18	6	2	3	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	3	3	3	430.000.000	430.000.000	430.000.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	788.027.580	788.027.580	788.027.580
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	9.471.200	9.471.200	9.471.200
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	97.582.800	97.582.800	97.582.800
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	8	8	8	20.157.500	20.157.500	20.157.500
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	660.816.080	660.816.080	660.816.080
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	657.035.289	536.121.004	545.063.861
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	20	20	20	326.906.489	205.992.204	214.935.061
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	3	3	3	330.128.800	330.128.800	330.128.800
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	953.025.950	953.025.950	1.059.275.950
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Pantai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Pantai							14.993.107.644	14.784.516.049	16.380.788.656
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	75.600	5.153.407	5.153.407	5.153.407	953.025.950	953.025.950	1.059.275.950
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	6	6	6	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	6	6	6	6	698.025.950	698.025.950	804.275.950
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	7.687.774.187	8.023.296.877	8.423.076.627
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1.057.844.900	1.298.367.590	1.278.147.340
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	1	20	20	20	1.017.844.900	1.258.367.590	1.238.147.340
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	566.481.000	566.481.000	566.481.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	2	2	2	566.481.000	566.481.000	566.481.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam	Hektar	50	50	50	50	2.921.150.000	3.016.150.000	3.436.150.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Pantai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Pantai							14.993.107.644	14.784.516.049	16.380.788.656
		dan dipelihara								
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	1	1	186.150.000	186.150.000	186.150.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	20	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179	7.929.179	7.929.179	7.929.179	3.182.298.287	3.182.298.287	3.182.298.287
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	8	158.000	158.000	158.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	30	12	12	12	1.134.000.000	1.134.000.000	1.134.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	50	12	12	12	1.738.298.287	1.738.298.287	1.738.298.287
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	2.905.020.400	2.905.020.400	3.955.020.400
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	6	6	6	2.905.020.400	2.905.020.400	3.955.020.400
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	4	15	15	21	105.000.000	105.000.000	655.000.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti	Kelompok	6	3	3	3	252.000.000	252.000.000	752.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Pantai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Pantai							14.993.107.644	14.784.516.049	16.380.788.656
		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan								
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	273	2833	2833	2833	2.548.020.400	2.548.020.400	2.548.020.400

Lampiran 8. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Tengah						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Berau Tengah							13.588.294.617	12.997.408.547	13.683.502.983
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.628.315.767	3.084.201.482	3.124.444.339
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	299.780.000	299.780.000	299.780.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	126.020.000	126.020.000	126.020.000
3.28.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12	12	12	173.760.000	173.760.000	173.760.000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	205.000.000	205.000.000	205.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	41	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	6	6	6	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	843.424.238	843.424.238	843.424.238
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	4	4	4	4	11.500.000	11.500.000	11.500.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Tengah						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Berau Tengah							13.588.294.617	12.997.408.547	13.683.502.983
		Bangunan Kantor yang Disediakan								
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	7	7	7	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	3	3	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238	589.424.238	589.424.238
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	%	100%	100%	100%	100%	662.000.000	238.800.000	270.100.000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	27	5	5	5	132.000.000	132.000.000	132.000.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	17	41	20	21	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	961.769.440	961.769.440	961.769.440
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	9.500.000	9.500.000	9.500.000
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	94.090.000	94.090.000	94.090.000
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	858.179.440	858.179.440	858.179.440
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	628.342.089	507.427.804	516.370.661
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	16	16	16	298.342.089	177.427.804	186.370.661
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	3	3	3	330.000.000	330.000.000	330.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Tengah						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Berau Tengah							13.588.294.617	12.997.408.547	13.683.502.983
	Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi								
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	953.025.950	953.025.950	1.059.275.950
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	301.650	5.153.407	5.153.407	5.153.407	953.025.950	953.025.950	1.059.275.950
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1	1	1	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	6	6	6	6	698.025.950	698.025.950	804.275.950
6	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	7.232.332.900	7.185.561.115	7.575.162.694
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1.555.360.900	1.413.589.115	1.383.190.694
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	1	5	5	5	1.555.360.900	1.413.589.115	1.383.190.694
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	321.664.000	321.664.000	321.664.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Tengah						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Berau Tengah							13.588.294.617	12.997.408.547	13.683.502.983
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	321.664.000	321.664.000	321.664.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	12	1	1	1	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	12	120	120	120	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	2	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.620.308.000	2.620.308.000	2.620.308.000
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	316	300	300	300	357.996.000	357.996.000	357.996.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12	12	12	12	389.900.000	389.900.000	389.900.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	24	12	12	12	1.872.412.000	1.872.412.000	1.872.412.000
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.774.620.000	1.774.620.000	1.924.620.000
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	4	4	6	1.774.620.000	1.774.620.000	1.924.620.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan	Kelompok	3	3	3	4	726.000.000	726.000.000	876.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Tengah						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Berau Tengah							13.588.294.617	12.997.408.547	13.683.502.983
		Kelembagaan								
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	100	1.000	1.000	1.000	1.048.620.000	1.048.620.000	1.048.620.000

Lampiran 9. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Utara						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Utara							13.978.445.357	13.423.307.060	15.110.353.241
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.473.956.807	2.929.842.522	2.970.085.379
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	321.200.000	321.200.000	321.200.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	131.300.000	131.300.000	131.300.000
3.28.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	12	12	12	189.900.000	189.900.000	189.900.000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4	4	4	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	205.000.000	205.000.000	205.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	27	3	3	3	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	42	42	42	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	914.924.238	914.924.238	914.924.238
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	12	1	1	1	11.500.000	11.500.000	11.500.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Utara						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Utara							13.978.445.357	13.423.307.060	15.110.353.241
		Disediakan								
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2	2	2	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	1	1	1	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	1	1	1	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	2	2	2	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238	589.424.238	589.424.238
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	%	100%	100%	100%	100%	568.000.000	144.800.000	176.100.000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	14	2	2	2	38.000.000	38.000.000	38.000.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	3	3	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	826.549.480	826.549.480	826.549.480
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	8.500.000	8.500.000	8.500.000
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	90.957.800	90.957.800	90.957.800
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	727.091.680	727.091.680	727.091.680
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	539.770.000	539.770.000	539.770.000
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit	14	22	22	22	354.110.589	233.196.304	242.139.161

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Utara						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Utara							13.978.445.357	13.423.307.060	15.110.353.241
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	32	32	32	81.172.500	81.172.500	81.172.500
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	175.000.000	175.000.000	175.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	1.136.103.950	1.136.103.950	1.242.353.950
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407	5.153.407	5.153.407	5.153.407	953.025.950	953.025.950	1.059.275.950
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1	1	1	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	1	7	7	7	698.025.950	698.025.950	804.275.950
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	M3	1	1	1	1	183.078.000	183.078.000	183.078.000
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan	Dokumen	2	7	7	7	183.078.000	183.078.000	183.078.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Utara						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Utara							13.978.445.357	13.423.307.060	15.110.353.241
		Provinsi								
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	8.134.063.600	8.123.039.588	8.763.592.912
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1.505.098.600	1.399.074.588	1.369.627.912
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	1	7	7	7	1.505.098.600	1.399.074.588	1.369.627.912
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	342.270.000	342.270.000	342.270.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	342.270.000	342.270.000	342.270.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	60	50	50	50	2.880.660.000	2.975.660.000	3.395.660.000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	50	50	50	3.280.660.000	3.375.660.000	3.795.660.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	10	1	1	1	145.660.000	145.660.000	145.660.000
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun			95	95	95	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179	7.929.179	7.929.179	7.929.179	3.006.035.000	3.006.035.000	3.256.035.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Utara						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Utara							13.978.445.357	13.423.307.060	15.110.353.241
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	20	44.126	44.126	44.126	857.555.000	857.555.000	857.555.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12	12	12	12	350.000.000	350.000.000	350.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	70	70	70	70	1.798.480.000	1.798.480.000	2.048.480.000
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.234.321.000	1.234.321.000	2.134.321.000
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	3	3	3	1.234.321.000	1.234.321.000	2.134.321.000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	10	10	10	21	102.261.000	102.261.000	502.261.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	3	3	3	487.880.000	487.880.000	487.880.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	250	600	600	600	644.180.000	644.180.000	1.144.180.000

Lampiran 10. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Bongan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Bongan							17.628.767.380	15.459.763.501	17.480.690.849
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.542.016.380	3.118.816.380	3.150.116.380
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	193.435.500	193.435.500	193.435.500
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	8	8	8	165.020.000	165.020.000	165.020.000
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	2	2	28.415.500	28.415.500	28.415.500
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	36.250.000	36.250.000	36.250.000
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	2.250.000	2.250.000	2.250.000
3.28.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000

		Kepegawaian								
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	8	8	8	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	12	12	12	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	1	1	1	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	4	4	4	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	7	7	7	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	5	5	5	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	3	3	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	3	3	3	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	4	4	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	15	15	15	520.000.000	520.000.000	520.000.000
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	%	100%	100%	100%	100%	596.000.000	172.800.000	204.100.000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	2	2	2	66.000.000	66.000.000	66.000.000

3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	2	3	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	938.851.780	938.851.780	938.851.780
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	11.455.600	11.455.600	11.455.600
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	178.380.500	178.380.500	178.380.500
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	749.015.680	749.015.680	749.015.680
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	683.579.100	683.579.100	683.579.100
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	27	27	27	327.950.100	327.950.100	327.950.100
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	24	24	24	63.329.000	63.329.000	63.329.000
3.28.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara	Unit	1	1	1	1	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	1	1	1	290.000.000	290.000.000	290.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	2.761.400.000	2.761.400.000	2.861.400.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	93.859	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1	1	1	255.000.000	255.000.000	255.000.000

3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	4	9	9	11	590.000.000	590.000.000	690.000.000
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	Hektar	5.153.407	5.153.407	5.153.407	5.153.407	1.916.400.000	1.916.400.000	1.916.400.000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	Unit Manajemen	1	1	1	1	1.916.400.000	1.916.400.000	1.916.400.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	9.748.213.000	8.002.409.121	9.192.036.469
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1.504.000.000	1.363.196.121	1.332.823.469
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	3	11	8	8	1.504.000.000	1.363.196.121	1.332.823.469
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	395.000.000	395.000.000	395.000.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	1	1	1	395.000.000	395.000.000	395.000.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	2	7.929.179	7.929.179	7.929.179	3.414.213.000	3.414.213.000	4.214.213.000
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli	Hektar	335.746	335.746	335.746	335.746	685.200.000	685.200.000	685.200.000

		Pengamanan Hutan								
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	14	2	2	12	200.000.000	200.000.000	1.000.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	27	30	30	30	2.529.013.000	2.529.013.000	2.529.013.000
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	1.) Jumlah SK Pengada/Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar; 2.) Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang terverifikasi	1.) Jumlah SK; 2.) Sertifikat	1	3	-	-	1.700.000.000	-	-
3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha	1	3	-	-	1.700.000.000	-	-
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.577.138.000	1.577.138.000	2.277.138.000
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	4	4	6	1.577.138.000	1.577.138.000	2.277.138.000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	4	4	4	4	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti	Kelompok	2	4	4	6	620.991.000	620.991.000	820.991.000

		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan								
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	600	1.600	1.600	1.600	856.147.000	856.147.000	1.356.147.000

Lampiran 11. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Damai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Damai							17.524.336.525	15.118.140.459	16.037.492.190
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.510.177.500	3.086.977.500	3.118.277.500
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	214.300.000	214.300.000	214.300.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	1	1	1	155.300.000	155.300.000	155.300.000
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2	2	2	40.000.000	40.000.000	40.000.000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	36.250.000	36.250.000	36.250.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	2	2	2	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	30	30	30	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Damai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Damai							17.524.336.525	15.118.140.459	16.037.492.190
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	1	1	1	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	4	4	4	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	19	34	34	34	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	4	4	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	4	4	4	589.424.238	589.424.238	589.424.238
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	%	100%	100%	100%	100%	664.945.600	241.745.600	273.045.600
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1	1	1	700.000.000	700.000.000	700.000.000
3.28.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	1	1	1	324.060.500	324.060.500	324.060.500
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	820.193.400	820.193.400	820.193.400
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4	4	4	9.500.000	9.500.000	9.500.000
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	4	4	4	138.382.600	138.382.600	138.382.600
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4	4	4	672.310.800	672.310.800	672.310.800

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Damai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Damai							17.524.336.525	15.118.140.459	16.037.492.190
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	680.588.500	680.588.500	680.588.500
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	14	14	14	354.906.589	233.992.304	242.935.161
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	290.000.000	290.000.000	290.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	845.000.000	845.000.000	945.000.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	112.541	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	6	1	1	1	107.997.500	107.997.500	107.997.500
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	14	4	4	4	698.025.950	698.025.950	804.275.950
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	M3 / Tahun	-	1	1	1	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha	Dokumen	15	15	15	15	200.000.000	200.000.000	200.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Damai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Damai							17.524.336.525	15.118.140.459	16.037.492.190
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	% %	0,47% 1%	0,47% 1%	0,71% 1%	0,95% 1%	10.709.885.025	8.726.888.959	9.064.940.690
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	3.477.742.325	1.399.746.259	1.317.797.990
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	1	7	7	7	149.999.600	149.999.600	149.999.600
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	36	6	6	6	3.327.742.725	1.249.746.659	1.167.798.390
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	660.468.500	660.468.500	660.468.500
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	3	1	1	1	660.468.500	660.468.500	660.468.500
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	50	50	50	3.378.152.500	3.473.152.500	3.893.152.500
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	115	115	115	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan	Laporan	2	1	1	1	643.152.500	643.152.500	643.152.500

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Damai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Damai							17.524.336.525	15.118.140.459	16.037.492.190
		Rehabilitasi Lahan								
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179	7.929.179	7.929.179	7.929.179	3.193.521.700	3.193.521.700	3.193.521.700
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	541.626	554.253	554.253	554.253	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	10	10	10	10	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	30	10	10	10	1.853.521.700	1.853.521.700	1.853.521.700
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	2.459.274.000	2.459.274.000	2.909.274.000
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	2	4	4	6	2.459.274.000	2.459.274.000	2.909.274.000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	2	20	20	20	250.000.000	250.000.000	500.000.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	10	5	5	5	659.274.000	659.274.000	859.274.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	1.000	200	200	200	1.550.000.000	1.550.000.000	1.550.000.000

Lampiran 12. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Delta Mahakam						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Delta Mahakam							17.840.318.644	16.658.649.408	18.787.226.726
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.839.399.400	3.416.199.400	3.447.499.400
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	170.300.000	170.300.000	170.300.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	8	8	8	155.300.000	155.300.000	155.300.000
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	2	2	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	36.250.000	36.250.000	36.250.000
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	2.250.000	2.250.000	2.250.000
3.28.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Delta Mahakam						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Delta Mahakam							17.840.318.644	16.658.649.408	18.787.226.726
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	90	8	8	8	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	12	12	12	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	1	1	1	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	4	4	4	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	7	7	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5	5	5	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	3	3	3	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	3	3	3	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	4	4	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	15	15	15	520.000.000	520.000.000	520.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Delta Mahakam						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Delta Mahakam							17.840.318.644	16.658.649.408	18.787.226.726
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100%	100%	100%	100%	596.000.000	172.800.000	204.100.000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	2	2	2	66.000.000	66.000.000	66.000.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	5	2	3	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	1.350.144.400	1.350.144.400	1.350.144.400
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	156.829.200	156.829.200	156.829.200
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	-	-	-	1.193.315.200	1.193.315.200	1.193.315.200
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	592.805.000	592.805.000	592.805.000
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	15	15	15	191.599.000	191.599.000	191.599.000
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	21	21	21	52.000.000	52.000.000	52.000.000
3.28.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara	Unit	1	1	1	1	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	346.906.000	346.906.000	346.906.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	1.629.810.000	1.629.810.000	1.729.810.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	37.578	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Delta Mahakam						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Delta Mahakam							17.840.318.644	16.658.649.408	18.787.226.726
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1	1	1	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	2	9	9	11	590.000.000	590.000.000	690.000.000
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	Hektar	5.153.407	5.153.407	5.153.407	5.153.407	784.810.000	784.810.000	784.810.000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	Unit Manajemen	1	1	1	1	784.810.000	784.810.000	784.810.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	7.763.342.622	7.004.873.386	8.402.150.704
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	2.190.000.000	1.336.530.764	1.313.808.082
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	1	1	1	1	40.000.000	40.000.000	40.000.000
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	29	27	15	15	2.150.000.000	1.296.530.764	1.273.808.082
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan	Dokumen	1	1	1	1	400.000.000	400.000.000	400.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Delta Mahakam						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Delta Mahakam							17.840.318.644	16.658.649.408	18.787.226.726
	Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun								
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	400.000.000	400.000.000	400.000.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	50	50	50	2.843.100.000	2.938.100.000	3.358.100.000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	1	1	108.100.000	108.100.000	108.100.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.330.242.622	2.330.242.622	3.330.242.622
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	2	2	12	500.000.000	500.000.000	1.500.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	1	4	4	12	1.830.242.622	1.830.242.622	1.830.242.622
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Hektar	72.312	610.540,98 Hektar	730.007,98 Hektar	930.007,98 Hektar	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	Hektar	1	50	50	50	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	Hektar	1	50	50	50	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	4.507.766.622	4.507.766.622	5.107.766.622

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Delta Mahakam						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Delta Mahakam							17.840.318.644	16.658.649.408	18.787.226.726
	KEHUTANAN									
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	6	1	1	1	4.507.766.622	4.507.766.622	5.107.766.622
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	1	10	10	12	250.000.000	250.000.000	850.000.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	700	1.000	1.000	1.000	4.257.766.622	4.257.766.622	4.257.766.622

Lampiran 13. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kelinjau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							13.919.083.760	13.179.737.639	15.332.262.332
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.372.274.760	2.949.074.760	2.980.374.760
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	170.300.000	170.300.000	170.300.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	1	155.300.000	155.300.000	155.300.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	6	6	6	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2	2	2	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	1	1	1	589.424.238	589.424.238	589.424.238
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didirikan	%	100%	100%	100%	100%	615.016.000	191.816.000	223.116.000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	6	6	6	85.016.000	85.016.000	85.016.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kelinjau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							13.919.083.760	13.179.737.639	15.332.262.332
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	442	7	4	5	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	759.010.760	759.010.760	759.010.760
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1	1	1	152.411.800	152.411.800	152.411.800
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1	1	1	606.598.960	606.598.960	606.598.960
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	697.798.000	697.798.000	697.798.000
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	32	32	32	412.441.089	291.526.804	300.469.661
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	44	8	8	8	65.870.000	65.870.000	65.870.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	1.002.762.000	1.002.762.000	1.102.762.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	950	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1	1	1	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1	1	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kelinjau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							13.919.083.760	13.179.737.639	15.332.262.332
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	1	1	1	1	698.025.950	698.025.950	804.275.950
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	M3	4.500	4.500	4.500	4.500	157.762.000	157.762.000	157.762.000
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	1	1	1	157.762.000	157.762.000	157.762.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	7.908.435.800	7.592.289.679	8.613.514.372
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	2.058.929.100	1.647.782.979	1.588.913.639
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	19	8	8	8	2.058.929.100	1.647.782.979	1.588.913.639
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	471.899.500	471.899.500	471.899.500
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1	1	1			

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kelinjau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							13.919.083.760	13.179.737.639	15.332.262.332
	Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun						471.899.500	471.899.500	471.899.500
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	60	50	50	50	2.835.000.000	2.930.000.000	3.350.000.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	60	100	100	100	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.542.607.200	2.542.607.200	3.202.701.233
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	4	237.500	237.500	237.500	375.000.000	375.000.000	375.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	5	1	1	1	350.000.000	350.000.000	1.010.094.033
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	37	42	42	42	1.817.607.200	1.817.607.200	1.817.607.200
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.635.611.200	1.635.611.200	2.635.611.200
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	8	3	3	3	1.635.611.200	1.635.611.200	2.635.611.200
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	5	5	5	5	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri	Kelompok	4	3	3	3	220.000.000	220.000.000	220.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kelinjau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							13.919.083.760	13.179.737.639	15.332.262.332
	Kelompok Tani Hutan	yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan								
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	1.696	1.000	1.000	1.000	1.115.611.200	1.115.611.200	2.115.611.200

Lampiran 14. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kendilo						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							17.766.515.172	14.039.271.292	15.230.075.477
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.538.834.580	3.115.634.580	3.146.934.580
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	160.700.000	160.700.000	160.700.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	12	12	12	145.700.000	145.700.000	145.700.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	10	10	10	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	5	5	5	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	7	7	7	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4	4	4	242.000.000	242.000.000	242.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kendilo						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							17.766.515.172	14.039.271.292	15.230.075.477
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4	4	4	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3	3	3	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	12	12	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238,00	589.424.238,00	589.424.238,00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100%	100%	100%	100%	662.362.400	239.162.400	270.462.400
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	6	6	6	132.362.400	132.362.400	132.362.400
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	20	20	20	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	2	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	999.774.880	999.774.880	999.774.880
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	139.328.800	139.328.800	139.328.800
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	860.446.080	860.446.080	860.446.080
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	585.847.300	585.847.300	585.847.300
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	31	34	34	34	357.071.189,00	236.156.904,00	245.099.761,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kendilo						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							17.766.515.172	14.039.271.292	15.230.075.477
	Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	37	37	37	56.460.000	56.460.000	56.460.000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	242.829.200	242.829.200	242.829.200
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	1.487.756.000	1.487.756.000	1.587.756.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	137.495	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1	1	1	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	9	1	1	1	698.025.950,00	698.025.950,00	804.275.950,00
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	Hektar	1	5.153.407	5.153.407	5.153.407	642.756.000	642.756.000	642.756.000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	Unit Manajemen	1	1	1	1	642.756.000	642.756.000	642.756.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	11.037.698.692	7.733.654.812	8.313.158.997
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan	Dokumen	1	1	1	1	4.729.144.322	1.330.100.442	1.239.604.627

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kendilo						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							17.766.515.172	14.039.271.292	15.230.075.477
	Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	yang disusun								
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	50	10	10	10	4.729.144.322	1.330.100.442	1.239.604.627
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	356.006.200	356.006.200	356.006.200
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	356.006.200	356.006.200	356.006.200
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	50	50	50	3.491.866.170	3.586.866.170	4.006.866.170
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	1	1	101.191.170	101.191.170	101.191.170
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	2	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.460.682.000	2.460.682.000	2.710.682.000
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	100	100	100	100	245.000.000	245.000.000	245.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	10	10	10	450.000.000	450.000.000	450.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	10	20	20	20	1.765.682.000	1.765.682.000	2.015.682.000
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.702.225.900	1.702.225.900	2.182.225.900

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kendilo						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							17.766.515.172	14.039.271.292	15.230.075.477
	MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN									
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	2	6	6	10	1.702.225.900	1.702.225.900	2.182.225.900
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	3	3	3	5	150.000.000	150.000.000	300.000.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	6	6	6	10	500.000.000	500.000.000	830.000.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	20	200	200	200	1.052.225.900	1.052.225.900	1.052.225.900

Lampiran 15. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Manubar						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Manubar							15.308.526.940	13.427.108.905	13.996.081.837
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.358.488.940	2.935.288.940	2.966.588.940
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	159.740.000	159.740.000	159.740.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	4	4	4	144.740.000	144.740.000	144.740.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	5	5	5	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7	12	12	12	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2	2	2	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4	4	4	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	2	2	2	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	2	2	2	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Paket	3	4	4	4	21.500.000	21.500.000	21.500.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Manubar						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Manubar							15.308.526.940	13.427.108.905	13.996.081.837
		Penggandaan yang Disediakan								
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	15	15	15	520.000.000	520.000.000	520.000.000
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	%	100%	100%	100%	100%	596.000.000	172.800.000	204.100.000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	5	5	5	66.000.000	66.000.000	66.000.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	10	6	7	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	919.199.440	919.199.440	919.199.440
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	4	4	4	150.781.200	150.781.200	150.781.200
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	4	4	4	768.418.240	768.418.240	768.418.240
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	553.399.500	553.399.500	553.399.500
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	31	31	31	271.002.589	150.088.304	159.031.161
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	147	147	147	62.910.000	62.910.000	62.910.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Presentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	9.847.405.750	8.389.187.715	8.826.860.647
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Manubar						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Manubar							15.308.526.940	13.427.108.905	13.996.081.837
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	2.977.480.700	1.424.262.665	1.366.935.597
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	12	7	7	7	2.977.480.700	1.424.262.665	1.366.935.597
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	742.035.500	742.035.500	742.035.500
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	2	2	2	742.035.500	742.035.500	742.035.500
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	50	50	50	3.535.000.000	3.630.000.000	4.050.000.000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	2	2	2	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	126	126	126	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	1	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.592.889.550	2.592.889.550	2.667.889.550
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	2	4	4	4	750.000.000	750.000.000	750.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	5	12	12	12	1.842.889.550	1.842.889.550	1.917.889.550
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.257.632.250	1.257.632.250	1.257.632.250

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Manubar						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Manubar							15.308.526.940	13.427.108.905	13.996.081.837
	MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN									
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	5	4	4	4	1.257.632.250	1.257.632.250	1.257.632.250
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	4	4	4	4	995.319.900	995.319.900	995.319.900
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	400	30	30	30	262.312.350	262.312.350	262.312.350

Lampiran 16. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Meratus						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Meratus							16.263.608.698	14.931.811.349	17.047.555.768
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.452.384.000	3.029.184.000	3.060.484.000
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	150.500.000	150.500.000	150.500.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	2	2	2	135.500.000	135.500.000	135.500.000
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	12	12	12	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	36.250.000	36.250.000	36.250.000
3.28.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	12	12	12	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	39	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket	12	2	2	2	11.500.000	11.500.000	11.500.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Meratus						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Meratus							16.263.608.698	14.931.811.349	17.047.555.768
	Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2	2	2	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	4	4	4	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	1	1	1	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	2	2	2	589.424.238,00	589.424.238,00	589.424.238,00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	%	100%	100%	100%	100%	596.000.000	172.800.000	204.100.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	24	7	4	5	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	807.901.400	807.901.400	807.901.400
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2	2	2	9.500.000	9.500.000	9.500.000
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	122.607.400	122.607.400	122.607.400
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	675.794.000	675.794.000	675.794.000
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	767.832.600	767.832.600	767.832.600
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	46	46	46	493.215.689,00	372.301.404,00	381.244.261,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Meratus						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Meratus							16.263.608.698	14.931.811.349	17.047.555.768
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	44	44	44	55.130.000	55.130.000	55.130.000
3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1	1	1	1	600.000.000	600.000.000	600.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	2.285.434.000	2.285.434.000	2.385.434.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	3	2	2	2	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	5	3	3	3	698.025.950,00	698.025.950,00	804.275.950,00
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	Hektar	1	5.153.407	5.153.407	5.153.407	1.440.434.000	1.440.434.000	1.440.434.000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	Unit Manajemen	1	1	1	1	1.440.434.000	1.440.434.000	1.440.434.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	9.158.490.698	8.249.893.349	9.684.337.768
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	8	1	1	1	2.485.904.900	1.482.307.551	2.434.288.750

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Meratus						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Meratus							16.263.608.698	14.931.811.349	17.047.555.768
	Kewenangan Provinsi									
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	8	35	35	35	2.485.904.900	1.482.307.551	2.434.288.750
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	3	1	1	1	921.892.650	921.892.650	921.892.650
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	3	2	2	2	921.892.650	921.892.650	921.892.650
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	1	1	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	208	208	208	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	2	7.929.179	7.929.179	7.929.179	3.015.693.148	3.015.693.148	3.078.156.368
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	1	150	150	150	284.400.000	284.400.000	284.400.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	3	4	4	4	920.000.000	920.000.000	920.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	4	4	4	4	1.811.293.148	1.811.293.148	1.873.756.368
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.367.300.000	1.367.300.000	1.917.300.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Meratus						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Meratus							16.263.608.698	14.931.811.349	17.047.555.768
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN									
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	8	7	7	7	1.367.300.000	1.367.300.000	1.917.300.000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	2	10	10	10	350.000.000	350.000.000	650.000.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	8	6	6	6	300.000.000	300.000.000	550.000.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	3	30	30	30	717.300.000	717.300.000	717.300.000

Lampiran 17. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Mook Manoor Bulatn						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Mook Manor Bulatn							16.051.550.180	15.212.325.175	16.257.564.362
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	4.750.707.280	4.327.507.280	4.358.807.280
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	160.700.000	160.700.000	160.700.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	145.700.000	145.700.000	145.700.000
3.28.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	12	12	12	439.056.000,00	439.056.000,00	439.056.000,00
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	36.250.000	36.250.000	36.250.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4	4	4	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	12	12	12	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Mook Manoor Bulatn						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Mook Manor Bulatn							16.051.550.180	15.212.325.175	16.257.564.362
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2	2	2	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	10	10	10	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	5	5	5	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	2	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238,00	589.424.238,00	589.424.238,00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	%	100%	100%	100%	100%	1.604.676.000	1.181.476.000	1.212.776.000
3.28.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2	2	2	698.200.000,00	698.200.000,00	698.200.000,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	927.332.280	927.332.280	927.332.280
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	138.382.600	138.382.600	138.382.600
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	780.449.680	780.449.680	780.449.680
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	927.849.000	927.849.000	927.849.000
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	Unit	15	30	30	30	259.670.289,00	138.756.004,00	147.698.861,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Mook Manoor Bulatn						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Mook Manor Bulatn							16.051.550.180	15.212.325.175	16.257.564.362
		Perizinannya								
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	35	35	35	62.470.000	62.470.000	62.470.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	845.000.000	845.000.000	945.000.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	85.751	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1	1	1	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	1	2	2	2	698.025.950,00	698.025.950,00	804.275.950,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	8.573.334.900	8.157.309.895	8.821.249.082
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	2.393.744.900	1.882.719.895	1.851.659.082
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	1	1	1	1	268.904.000	268.904.000	268.904.000
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor	Unit	1	2	2	2	2.124.840.900	1.613.815.895	1.582.755.082

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Mook Manoor Bulatn						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Mook Manor Bulatn							16.051.550.180	15.212.325.175	16.257.564.362
	KPH	dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun								
3.28.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	318.260.000	318.260.000	318.260.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	1	1	1	318.260.000	318.260.000	318.260.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	50	50	50	3.430.610.000	3.525.610.000	3.945.610.000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	1	1	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	120	120	120	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.430.720.000	2.430.720.000	2.705.720.000
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	410.738	410.738	410.738	410.738	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	3	3	3	3	340.000.000	340.000.000	340.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	3	5	5	5	1.790.720.000	1.790.720.000	2.065.720.000
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,	1). Luas kawasan hutan yang dikelola	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.882.508.000	1.882.508.000	2.132.508.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Mook Manoor Bulatn						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Mook Manor Bulatn							16.051.550.180	15.212.325.175	16.257.564.362
	PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	masyarakat								
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	15	5	5	5	1.882.508.000	1.882.508.000	2.132.508.000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	3	4	4	4	196.508.000	196.508.000	446.508.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	4	5	5	5	706.000.000	706.000.000	706.000.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	1.643	1.000	1.000	1.000	980.000.000	980.000.000	980.000.000

Lampiran 18. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Santan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Santan							17.108.415.090	15.383.274.210	15.844.134.385
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	4.026.033.240	3.602.833.240	3.634.133.240
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	177.020.000	177.020.000	177.020.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	162.020.000	162.020.000	162.020.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	3	3	3	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9	7	7	7	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	3	3	3	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	1	1	1	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	21.500.000	21.500.000	21.500.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Santan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Santan							17.108.415.090	15.383.274.210	15.844.134.385
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238,00	589.424.238,00	589.424.238,00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100%	100%	100%	100%	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	9	9	9	1.191.316.800,00	1.191.316.800,00	1.191.316.800,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	879.899.640	879.899.640	879.899.640
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	118.198.200	118.198.200	118.198.200
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	761.701.440	761.701.440	761.701.440
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	1.308.963.600	1.308.963.600	1.308.963.600
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	65	56	56	56	793.175.489,00	672.261.204,00	681.204.061,00
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	63	63	63	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	845.000.000	845.000.000	945.000.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	267.068	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Santan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Santan							17.108.415.090	15.383.274.210	15.844.134.385
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	11	11	11	11	698.025.950,00	698.025.950,00	804.275.950,00
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	Hektare	100	100	100	100	773.640.000	773.640.000	773.640.000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	Unit	1	1	1	1	822.306.000,00	822.306.000,00	822.306.000,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	11.377.074.450	10.075.133.570	10.404.693.745
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.721.187.450	3.324.246.570	3.233.806.745
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	3	1	1	1	4.721.187.450,00	3.324.246.570,00	3.233.806.745,00
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	305.000.000	305.000.000	305.000.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	2	2	2	305.000.000	305.000.000	305.000.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	25	50	50	50	3.456.987.500	3.551.987.500	3.971.987.500
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar	Hektar	25	115	115	115	2.735.000.000,00	2.830.000.000,00	3.250.000.000,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Santan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Santan							17.108.415.090	15.383.274.210	15.844.134.385
	Hutan Negara	Kawasan Hutan Negara								
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	1	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.893.899.500	2.893.899.500	2.893.899.500
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	267.068	267.068	267.068	267.068	325.502.000	325.502.000	325.502.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12	12	12	12	592.963.000	592.963.000	592.963.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	38	12	12	12	1.975.434.500	1.975.434.500	1.975.434.500
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	860.307.400	860.307.400	860.307.400
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	5	1	1	1	860.307.400	860.307.400	860.307.400
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	1	1	1	1	266.477.500,00	266.477.500,00	266.477.500,00
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	200	1.000	1.000	1.000	860.307.400	860.307.400	860.307.400

Lampiran 19. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Sub DAS Belayan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Sub DAS Belayan							15.967.050.720	14.453.154.127	14.946.262.353
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.768.467.920	3.345.267.920	3.376.567.920
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	162.740.000	162.740.000	162.740.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	147.740.000	147.740.000	147.740.000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	36.250.000	36.250.000	36.250.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4	4	4	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	117	3	3	3	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	10	10	10	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	5	5	5	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	38.500.000	38.500.000	38.500.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Sub DAS Belayan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Sub DAS Belayan							15.967.050.720	14.453.154.127	14.946.262.353
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	3	3	3	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238,00	589.424.238,00	589.424.238,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	1.012.243.920	1.012.243.920	1.012.243.920
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	109.994.400	109.994.400	109.994.400
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	902.249.520	902.249.520	902.249.520
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	933.334.000	933.334.000	933.334.000
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	53	50	50	50	577.587.089,00	456.672.804,00	465.615.661,00
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	30	30	30	136.260.000	136.260.000	136.260.000
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	4	4	4	290.000.000	290.000.000	290.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	845.000.000	845.000.000	945.000.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	272.566	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas	Dokumen	1	1	1	1	255.000.000	255.000.000	255.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Sub DAS Belayan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Sub DAS Belayan							15.967.050.720	14.453.154.127	14.946.262.353
	Kawasan Hutan Produksi	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala								
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	3	4	4	5	698.025.950,00	698.025.950,00	804.275.950,00
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	Hektare	100	100	100	100	773.640.000	773.640.000	773.640.000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	Unit	2	2	2	2	773.640.000,00	773.640.000,00	773.640.000,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	9.289.980.900	8.199.284.307	8.561.092.533
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	3.023.146.400	1.837.449.807	1.779.258.033
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	1	4	4	4	3.023.146.400	1.837.449.807	1.779.258.033
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	1	1	1	297.250.000	297.250.000	297.250.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	2	2	2	297.250.000	297.250.000	297.250.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Sub DAS Belayan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Sub DAS Belayan							15.967.050.720	14.453.154.127	14.946.262.353
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	50	50	50	2.855.471.200	2.950.471.200	3.370.471.200
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	1	1	120.471.200	120.471.200	120.471.200
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	100	100	100	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	2	7.929.179	7.929.179	7.929.179	3.114.113.300	3.114.113.300	3.114.113.300
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	3	997.384	997.384	997.384	350.000.000	350.000.000	350.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	3	3	3	3	500.000.000	500.000.000	500.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	3	3	3	12	2.264.113.300	2.264.113.300	2.264.113.300
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	2.063.601.900	2.063.601.900	2.063.601.900
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	172	3	3	3	2.063.601.900	2.063.601.900	2.063.601.900
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	5	8	8	8	200.000.000	200.000.000	200.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Sub DAS Belayan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Sub DAS Belayan							15.967.050.720	14.453.154.127	14.946.262.353
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	1	3	3	3	600.000.000	600.000.000	600.000.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	2.000	1.000	1.000	1.000	1.263.601.900	1.263.601.900	1.263.601.900

Lampiran 20. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Telake						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Telake							17.010.408.618,00	16.070.545.586,00	18.908.968.898,00
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.973.180.818,00	3.549.980.818,00	3.581.280.818,00
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	225.220.000	225.220.000	225.220.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	3	3	3	155.300.000	155.300.000	155.300.000
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	12	12	44.920.000	44.920.000	44.920.000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	36.250.000	36.250.000	36.250.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4	4	4	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	4	4	4	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Orang	12	60	60	60	105.000.000	105.000.000	105.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Telake						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Telake							17.010.408.618,00	16.070.545.586,00	18.908.968.898,00
		Pendidikan dan Pelatihan								
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2	2	2	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	5	5	5	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	2	2	2	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	3	3	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	2	2	2	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	18	12	12	12	589.424.238,00	589.424.238,00	589.424.238,00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didirikan	%	100%	100%	100%	100%	740.812.200	317.612.200	348.912.200
3.28.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	494.890.000,00	494.890.000,00	494.890.000,00
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	18	3	3	3	99.000.000	99.000.000	99.000.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	22	78	15	16	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	2	3.503.438.400,00	3.503.438.400,00	3.503.438.400,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	1.034.682.018	1.034.682.018	1.034.682.018

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Telake						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Telake							17.010.408.618,00	16.070.545.586,00	18.908.968.898,00
	Daerah									
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	3	3	70.811.000	70.811.000	70.811.000
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3	3	3	963.871.018	963.871.018	963.871.018
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	867.316.600	867.316.600	867.316.600
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	30	30	30	416.628.589,00	295.714.304,00	304.657.161,00
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	30	30	30	30.940.000	30.940.000	30.940.000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2	2	2	200.261.100	200.261.100	200.261.100
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	845.000.000	845.000.000	945.000.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	96.298	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	2	2	2	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan	Dokumen	9	2	2	2	698.025.950,00	698.025.950,00	804.275.950,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Telake						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Telake							17.010.408.618,00	16.070.545.586,00	18.908.968.898,00
		Produksi								
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	Hektare	18	18	18	18	304.054.000	304.054.000	304.054.000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	Unit	2	2	2	2	304.054.000,00	304.054.000,00	304.054.000,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	10.842.227.800	10.325.564.768	11.332.688.080
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	3.653.187.800	3.041.524.768	3.628.648.080
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	1	2	2	2	332.628.000	332.628.000	332.628.000
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	6	10	10	10	3.320.559.800	2.708.896.768	3.296.020.080
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	330.816.000	330.816.000	330.816.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	2	2	2	330.816.000	330.816.000	330.816.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	64	50	50	50	4.044.740.000	4.139.740.000	4.559.740.000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana	Jumlah Dokumen	Dokumen		2	2	2	136.480.000		

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Telake						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Telake							17.010.408.618,00	16.070.545.586,00	18.908.968.898,00
	Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		2					136.480.000	136.480.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	64	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	6	4	4	4	1.173.260.000	1.173.260.000	1.173.260.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	2	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.813.484.000	2.813.484.000	2.813.484.000
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	249.965	249.965	249.965	249.965	301.134.000,00	301.134.000,00	301.134.000,00
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	10	8	8	8	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	5	10	10	10	1.913.484.000	1.913.484.000	1.913.484.000
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.350.000.000	1.350.000.000	3.050.000.000
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	3	3	3	1.350.000.000	1.350.000.000	3.050.000.000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	6	10	10	10	100.000.000	100.000.000	850.000.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri	Kelompok	3	3	3	3	150.000.000	150.000.000	500.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Telake						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Telake							17.010.408.618,00	16.070.545.586,00	18.908.968.898,00
	Kelompok Tani Hutan	yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan								
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	2.563	2.000	2.000	2.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.700.000.000

Lampiran 21. Rencana Pendanaan di UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Tahura						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Tahura Bukit Soeharto							20.627.732.020	20.204.532.020	20.835.832.020
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	5.147.128.320	4.723.928.320	4.755.228.320
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	151.820.000	151.820.000	151.820.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	136.820.000,00	136.820.000,00	136.820.000,00
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	217.000.000	217.000.000	217.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	3	3	3	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	40	40	40	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1	1	1	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	1	1	1	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	1	1	1	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	1	1	1	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen	Dokumen	12	12	12	12			

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Tahura						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Tahura Bukit Soeharto							20.627.732.020	20.204.532.020	20.835.832.020
	dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238,00	589.424.238,00	589.424.238,00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	%	100%	100%	100%	100%	641.812.200	218.612.200	249.912.200
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	26	26	26	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2	2	2	111.812.200	111.812.200	111.812.200
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	981.002.420	981.002.420	981.002.420
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	203.590.500	203.590.500	203.590.500
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	777.411.920	777.411.920	777.411.920
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	2.272.343.700	2.272.343.700	2.272.343.700
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	62	62	62	769.084.389,00	648.170.104,00	657.112.961,00
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	44	44	44	96.241.200	96.241.200	96.241.200
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	3	3	3	3.172.466.520,00	3.172.466.520,00	3.172.466.520,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Tahura						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Tahura Bukit Soeharto							20.627.732.020	20.204.532.020	20.835.832.020
	Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi								
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	353.189.000	353.189.000	353.189.000
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	353.189.000	353.189.000	353.189.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	353.189.000	353.189.000	353.189.000
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Hektar	72.312	610.540,98 Hektar	730.007,98 Hektar	930.007,98 Hektar	12.113.505.000	12.529.348.000	12.529.348.000
3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	Hektar	64.814,98	64.814,98	64.814,98	64.814,98	12.113.505.000	12.113.505.000	12.113.505.000
3.28.04.1.01.02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi	12	12	12	12	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
3.28.04.1.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Hektar	400	250	250	250	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	1	3	3	3	813.505.000	813.505.000	813.505.000
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	Hektar	1	1	1	1	415.843.000	415.843.000	415.843.000
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelompok/Masyarakat	Kelompok	120	120	120	120	587.661.200,00	587.661.200,00	587.661.200,00


Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Tahura						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Tahura Bukit Soeharto							20.627.732.020	20.204.532.020	20.835.832.020
	di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	yang Diberdayakan								
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha	100	100	100	100	700.000.000	700.000.000	700.000.000
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	2.598.066.700	2.598.066.700	3.198.066.700
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	8	4	4	2	2.598.066.700	2.598.066.700	3.198.066.700
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	5	3	3	3	1.098.066.700	1.098.066.700	1.698.066.700
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	100	20	20	20	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

NIP. 19690512 198903 2 009

A photograph of a waterfall cascading over a large, dark rock formation in a lush forest. The water is white and frothy as it falls. The background is filled with tall, thin trees and some palm trees on the right. The image is overlaid with a semi-transparent green geometric pattern in the top-left and bottom-right corners.

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Kesuma Bangsa, Kota Samarinda, Kode Pos 75123

Telp. 741963 - 741807, Fax. 736003

Email: dishut.kaltim@gmail.com

dishut.kaltimprov.go.id